

**ANALISIS PENGARUH PDRB, BELANJA MODAL, DAN
KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA PADA 34 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN
2014-2019**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Refrian Adam

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Analisis Pengaruh PDRB, Belanja Modal, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2019"

Yang disusun oleh :

Nama : Refrian Adam
 NIM : 175020100111039
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
 Jurusan : Ilmu Ekonomi
 Program Studi : S1 Ekonomi Pembangunan
 Konsentrasi : Keuangan Negara dan Daerah

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **27 April 2021** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Eddy Suprpto, SE., ME.
 NIP. 1958070919886031002
 (Dosen Pembimbing)



2. Nugroho Suryo Bintoro, SE., M.Ec.Dev., Ph.D.
 NIP. 198608012015041004
 (Dosen Penguji I)



3. Dr. Susilo, SE., MS.
 NIP. 196010301986011001
 (Dosen Penguji II)



Malang, 27 April 2021
 Ketua Program Studi
 S1 Ekonomi Pembangunan,



Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.
 NIP. 196503111989032001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Refrian Adam
 Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 08 September 1998
 NIM : 175020100111039
 Jurusan : Ilmu Ekonomi
 Program Studi : S1 Ekonomi Pembangunan
 Konsentrasi : Keuangan Negara dan Daerah
 Alamat : JL. Swadaya VIII No.36, Duren Sawit, Jakarta Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

Analisis Pengaruh PDRB, Belanja Modal, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2019

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 April 2021

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



Eddy Suprpto, SE., ME.
NIP. 195807091986031002

Yang membuat pernyataan,



Refrian Adam
NIM. 175020100111039

Mengetahui,
Ketua Program Studi
S1 Ekonomi Pembangunan,



Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.
NIP. 196503111989032001

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pembangunan Manusia.....	12
2.1.1 Konsep Pembangunan Manusia.....	12
2.1.2 Teori Indeks Pembangunan Manusia.....	13
2.1.3 Komponen Penyusun IPM.....	14
2.1.4 Tata Cara Perhitungan IPM.....	16
2.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	18
2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	18
2.3 Produk Domestik Regional Bruto.....	22
2.3.1 Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	22
2.3.2 Pendekatan Perhitungan PDRB.....	22
2.3.3 Manfaat PDRB.....	23
2.4 Pengeluaran Pemerintah.....	24

2.4.1 Teori Pengeluaran Pemerintah	24
2.4.2 Konsep Belanja Modal	28
2.5 Kemiskinan	30
2.5.1 Teori Kemiskinan	30
2.5.2 Penyebab dan Dampak Kemiskinan	31
2.5.3 Pengukuran Kemiskinan	35
2.6 Hubungan Antar Variabel	36
2.6.1 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dan IPM	36
2.6.2 Hubungan Belanja Modal dan IPM	37
2.6.3 Hubungan Kemiskinan dan IPM	40
2.7 Penelitian Terdahulu	41
2.8 Kerangka Pemikiran	44
2.9 Hipotesis	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Pendekatan Penelitian	48
3.2 Objek dan Waktu Penelitian	48
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	49
3.4 Metode Pengumpulan Data	50
3.5 Metode Analisis	51
3.5.1 Analisis Regresi Data Panel	51
3.5.2 Pemilihan Model Terbaik	54
3.5.3 Uji Asumsi Klasik	58
3.5.4 Pengujian Statistik	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	64
4.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	65
4.2.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia	65
4.2.2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	68
4.2.3 Perkembangan Belanja Modal	71
4.2.4 Perkembangan Kemiskinan	73



4.3 Hasil Penelitian	75
4.3.1 Pemilihan Model Terbaik	75
4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	77
4.3.3 Hasil Estimasi	81
4.3.4 Hasil Uji Statistik	85
4.4 Pembahasan	88
4.4.1 Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap IPM	88
4.4.2 Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap IPM	92
4.4.3 Analisis Pengaruh Kemiskinan terhadap IPM	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	100
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	104
DAFTAR LAMPIRAN	109

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Nilai Minimum dan Maksimum Komponen Penyusun IPM.....	16
Tabel 4. 1 Klasifikasi Kelompok IPM Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2019....	67
Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow.....	75
Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman.....	76
Tabel 4. 4 Hasil Uji Koefisien Korelasi	79
Tabel 4. 5 Hasil Uji Glejser	80
Tabel 4. 6 Hasil Estimasi Regresi Model <i>Fixed Effect</i>	81
Tabel 4. 7 Nilai <i>Unobserved Factor</i> Setiap <i>Cross Section unit</i>	82
Tabel 4. 8 Ringkasan Hasil Koefisien Determinasi.....	85
Tabel 4. 9 Ringkasan Hasil Uji Statistik F	86
Tabel 4. 10 Ringkasan Hasil Uji Statistik t.....	87

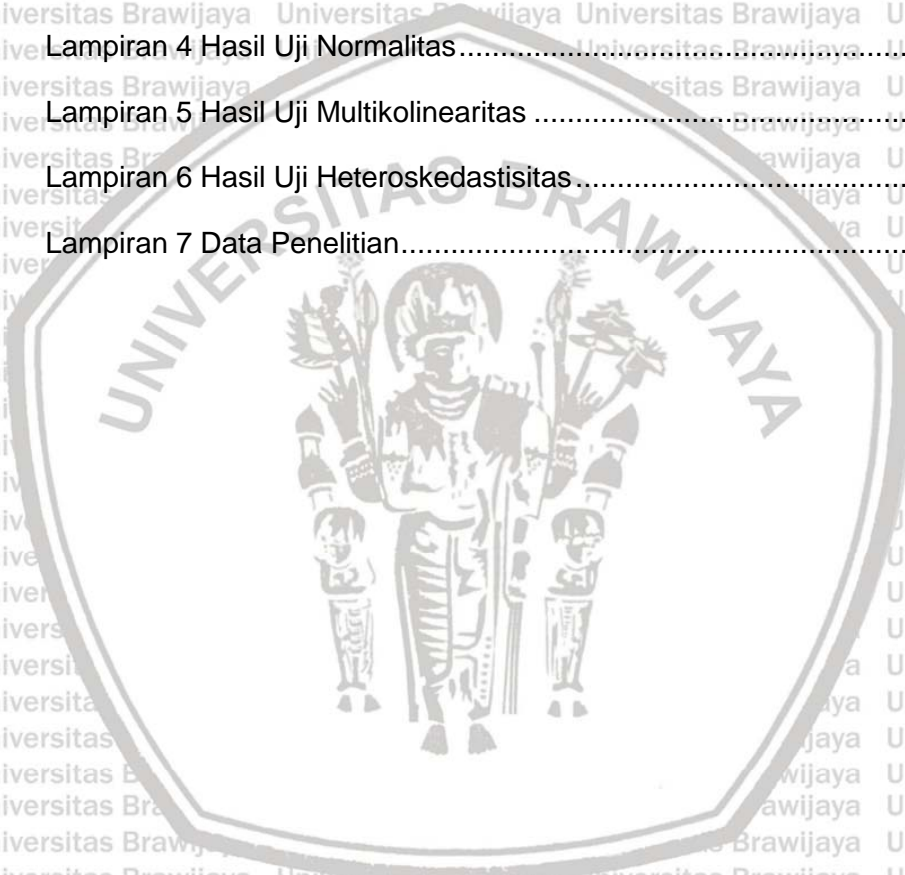
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan IPM Indonesia Tahun 2014-2019	3
Gambar 1. 2 Capaian IPM pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2019	4
Gambar 1. 3 Perkembangan Realisasi Belanja Modal pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2019	7
Gambar 2. 1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	27
Gambar 2. 2 Diagram Siklus Perangkap Kemiskinan	32
Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran	45
Gambar 4. 1 Peta Indonesia	64
Gambar 4. 2 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2014 dan 2019	66
Gambar 4. 3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2014 dan 2019	69
Gambar 4. 4 Rata-Rata Realisasi Belanja Modal Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2019	71
Gambar 4. 5 Persentase Kemiskinan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2014 dan 2019	73
Gambar 4. 6 Hasil Uji Jarque Bera	78
Gambar 4. 7 Perkembangan PDRB Perkapita Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2014 dan 2019	89
Gambar 4. 8 Perkembangan Koefisien Gini Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2014 dan 2019	90
Gambar 4. 9 Perkembangan HLS dan RLS di Indonesia Tahun 2014-2019	93
Gambar 4. 10 Perkembangan Umur Harapan Hidup Indonesia pada Periode Tahun 2014-2019	94
Gambar 4. 11 Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2019	97



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Uji Chow.....	109
Lampiran 2 Hasil Uji Hausman.....	110
Lampiran 3 Hasil Estimasi Model <i>Fixed Effect</i>	111
Lampiran 4 Hasil Uji Normalitas.....	111
Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinearitas	112
Lampiran 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	112
Lampiran 7 Data Penelitian.....	113





ABSTRACTION

Adam, Refrian. 2021. An analysis of the effect of GRDP, capital expenditure, and poverty on the human development index of 34 provinces in Indonesia in periods of 2014-2019. Minor Thesis, Departemen of Economics, Faculty of Economics and Business, Brawijaya University. Eddy Suprpto, SE., ME.

This study aims to analyze the effect of GRDP, capital expenditure, and poverty on the human development index of 34 provinces in Indonesia in periods of 2014-2019. This research is quantitative study using secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics and the Directorate General of Fiscal Balance. The method used in this study is panel data regression with fixed effect model. The results of this study show that GRDP and capital expenditure have a positive and significant effect on human development index, while the poverty has a negative and significant effect on human development index of 34 provinces in Indonesia in periods of 2014-2019.

Keywords: Human Development Index (HDI), GRDP, Capital Expenditure, Poverty.



ABSTRAKSI

Adam, Refrian. 2021. Analisis Pengaruh PDRB, Belanja Modal, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2019. Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Eddy Suprpto, SE., ME.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari PDRB, belanja modal, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2014-2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJKP). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan model efek tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan belanja modal memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan kemiskinan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2014-2019.

Kata kunci: IPM, PDRB, Belanja Modal, Kemiskinan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma pembangunan telah mengalami perubahan. Pada awalnya keberhasilan pembangunan dalam suatu wilayah semata-mata hanya dilihat melalui tingginya pertumbuhan ekonomi yang didasari oleh besarnya akumulasi kapital, dengan harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut mampu mendistribusikan hasil-hasil pembangunan secara merata ke seluruh lapisan penduduk melalui efek rembesan ke bawah (*trickle down effect*) dalam perekonomian. Dalam kenyataannya justru terjadi hal sebaliknya, hasil-hasil pembangunan dari tingginya pertumbuhan ekonomi yang berlangsung hanya dapat dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu sehingga menyebabkan jurang ketimpangan ekonomi semakin melebar. Setelah kegagalan tersebut, muncul paradigma pembangunan baru yang dikenal sebagai paradigma pembangunan manusia (Arsyad, 2010).

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan, bukan hanya sebagai alat pembangunan. Ide dasarnya adalah memberi kebebasan kepada penduduk untuk memperluas pilihan-pilihan hidup dan mengembangkan potensi penuh mereka melalui peningkatan kapabilitas aktualnya (Sen, 1999). Adapun keunggulan dari

pembangunan manusia adalah sifat multidimensional yang melekat pada prosesnya, artinya pembangunan tidak lagi murni hanya secara ekonomi tetapi juga menyangkut aspek sosial penduduk. Dengan demikian harapannya pembangunan yang berlangsung dapat disertai dengan pemerataan pendapatan dan setiap penduduk mampu memenuhi kebutuhan mendasarnya sehingga mendorong terwujudnya kesejahteraan yang bersifat universal (Todaro dan Smith, 2014).

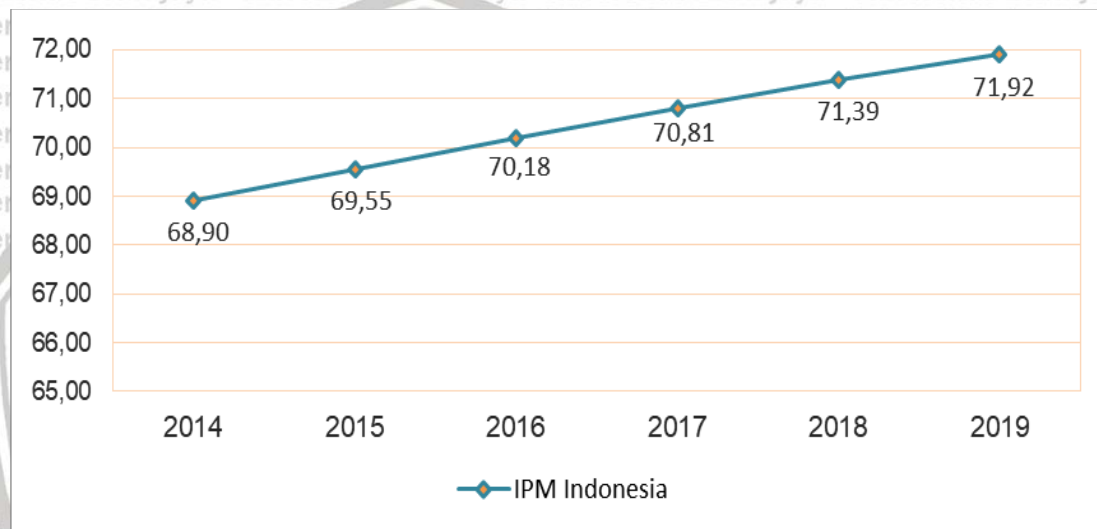
Dalam perkembangannya, pada tahun 1990 United Nation Development Program untuk pertama kalinya mempublikasikan *human development report* yang berisi kajian mengenai pembangunan manusia. Dalam laporan tersebut, dengan berlandaskan pemikiran ekonom Mahbub ul Haq, pembangunan manusia diformulasikan menjadi sebuah indikator komposit yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini merupakan tolok ukur objektif dalam melihat capaian pembangunan pada suatu wilayah yang didasarkan atas tiga bidang prioritas utama, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan terpenuhinya ketiga hal dasar tersebut maka setiap penduduk akan memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik sehingga kualitas hidupnya akan mengalami peningkatan (UNDP, 1990).

Pada negara Indonesia, pembangunan manusia telah menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah menyadari bahwa sumber utama kekayaan bangsa adalah sumber daya manusianya, sementara sumber daya alam sekadar faktor produksi yang akan habis dikemudian hari.

Gambar 1.1 menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas

pembangunan manusia di Indonesia. Melalui grafik tersebut dapat dilihat bahwa nilai IPM Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2014 sebesar 68,90 poin dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 71,92 poin.

Gambar 1. 1: Perkembangan IPM Indonesia Tahun 2014-2019

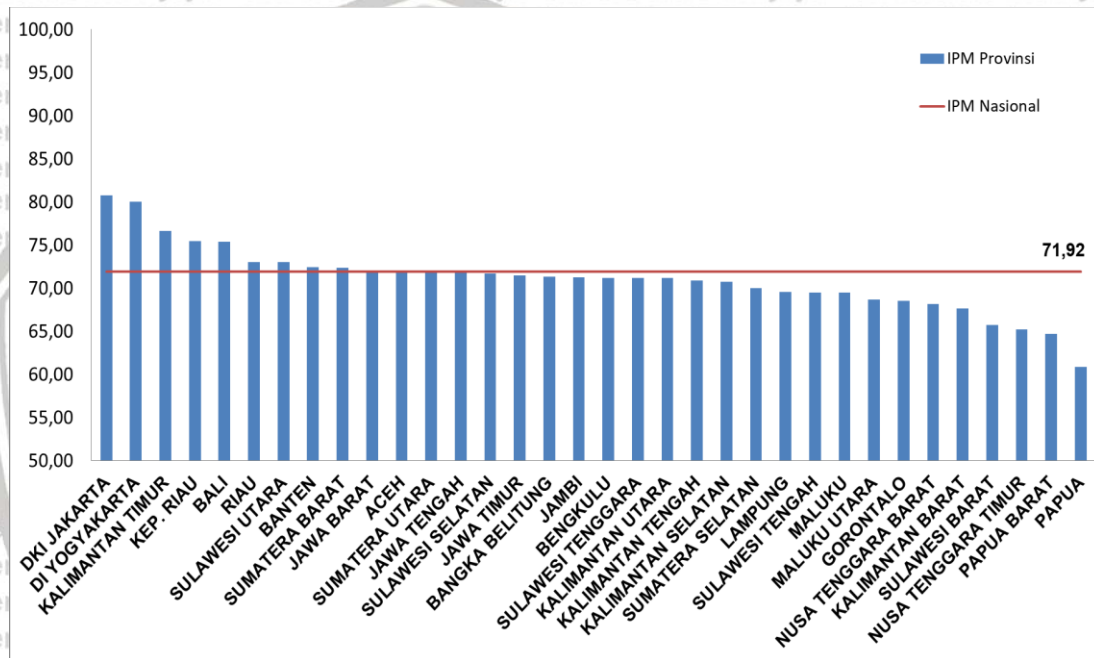


Sumber: Data diolah dari BPS, berbagai tahun.

Peningkatan nilai IPM yang berlangsung juga telah menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan nilai IPM berstatus tinggi sejak tahun 2016 silam. Berdasarkan hal tersebut, secara sepintas pembangunan manusia di Indonesia terlihat baik, akan tetapi bilamana ditelisik lebih mendalam lagi maka dapat terlihat jelas bahwa kondisi pembangunan manusia di Indonesia belum berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan oleh rendahnya peringkat IPM Indonesia, pada tahun 2019 nilai IPM Indonesia berada pada peringkat 6 di kawasan *Association of South East Asian Nation (ASEAN)* dan peringkat 107 di dunia. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan sebab Indonesia termasuk salah satu negara dengan

jumlah penduduk terbanyak di dunia sehingga kualitas pembangunan manusia merupakan faktor krusial yang dapat menentukan keberhasilan pembangunan nasional di masa mendatang.

Gambar 1. 2: Capaian IPM pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2019



Sumber: Data diolah dari BPS (2019).

Tidak optimalnya pembangunan manusia di Indonesia juga dapat dilihat melalui adanya ketimpangan nilai capaian IPM, baik di antara provinsi maupun wilayah. Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa nilai capaian IPM di antara provinsi di Indonesia sangat bervariasi. Pada tahun 2019 peringkat IPM teratas diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai IPM sebesar 80,76 poin dan termasuk dalam kategori sangat tinggi, sedangkan peringkat IPM terbawah diduduki oleh Provinsi Papua dengan nilai IPM sebesar 60,84 poin dan termasuk dalam

kategori sedang. Dengan kata lain, terdapat ketimpangan sebesar 19,92 poin yang menunjukkan masih sangat tingginya perbedaan pencapaian pembangunan manusia di Indonesia.

Terjadinya polarisasi pencapaian pembangunan manusia di Indonesia juga menjadi tidak dapat terelakkan. Pada umumnya, provinsi pada Kawasan Barat Indonesia (KBI) secara relatif memiliki nilai IPM yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi pada Kawasan Timur Indonesia (KTI). Terbukti bahwa pada KBI terdapat sembilan provinsi yang memiliki nilai IPM di atas rata-rata IPM nasional, sedangkan pada KTI hanya terdapat satu provinsi yang memiliki nilai IPM di atas rata-rata IPM nasional, yaitu Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai IPM 72,99 poin. Dalam mengatasi ketimpangan yang terjadi, diperlukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pembangunan manusia di Indonesia. Ketika faktor-faktor tersebut diketahui maka pembangunan manusia di Indonesia dapat berjalan lebih optimal.

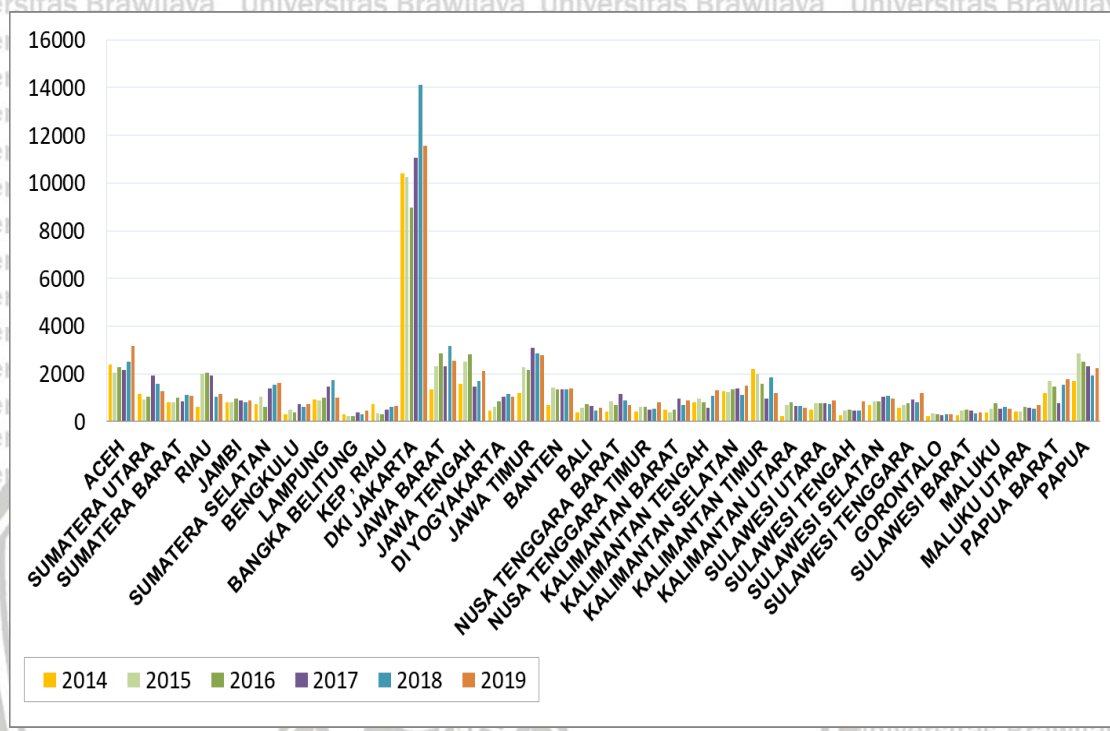
Secara konseptual, pembangunan manusia memiliki keterkaitan erat dengan kondisi perekonomian yang tercermin dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan penduduknya (Maulana dan Bowo, 2013). Pada tahun 2014-2019 PDRB pada seluruh provinsi di Indonesia secara umum memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya. Perkembangan PDRB yang berlangsung tersebut merupakan sebuah sarana efektif untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia pada masing-masing provinsi di Indonesia, khususnya bagi provinsi dengan nilai IPM di bawah

rata-rata IPM nasional. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya PDRB maka pendapatan perkapita penduduk akan menjadi semakin tinggi sehingga daya beli penduduk menguat dan mereka memiliki kemampuan pengeluaran yang lebih tinggi untuk melakukan konsumsi pada barang dan jasa yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan manusia (Rakhmadani, 2018).

Dalam rangka memperbaiki kualitas pembangunan manusia maka dibutuhkan adanya peran campur tangan pemerintah melalui fungsi pengeluarannya. Semenjak Indonesia melaksanakan desentralisasi fiskal pada tahun 2001 maka setiap pemerintah daerah diberikan diskresi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran daerahnya sendiri, baik secara administratif maupun pemanfaatannya (Khusaini, 2007). Berdasarkan aturan tersebut, kebijakan fiskal pemerintah daerah dapat difokuskan untuk pembangunan manusia (*pro human development*) melalui penganggaran belanja pada bidang yang berkaitan langsung dengan dimensi IPM.

Salah satu jenis belanja pemerintah yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia adalah belanja modal. Hal ini dikarenakan belanja modal dapat digunakan untuk menyediakan fasilitas publik pada bidang-bidang yang mencakup sasaran dimensi pembangunan manusia, antara lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan tersedianya fasilitas publik yang memadai maka seluruh lapisan penduduk dapat meningkatkan taraf kesejahterannya sehingga pembangunan manusia dapat berlangsung lebih optimal.

Gambar 1. 3: Perkembangan Realisasi Belanja Modal Pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2019 (dalam miliar rupiah)



Sumber: Data diolah dari DJPK RI, berbagai tahun.

Dalam perkembangannya, berdasarkan informasi pada gambar 1.3 dapat dilihat bahwa belanja modal yang dianggarkan oleh seluruh provinsi di Indonesia mengalami laju perkembangan yang sangat dinamis. Pada tahun 2014-2018 realiasi belanja modal secara umum mengalami tren peningkatan, akan tetapi tahun 2018-2019 mengalami tren penurunan. Adapun dalam kurun waktu enam tahun terakhir, belanja modal paling tinggi dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata sebesar Rp11,05 triliun, sedangkan belanja modal paling rendah dilakukan oleh Provinsi Gorontalo dengan rata-rata Rp281,50 miliar.

Terjadinya perbedaan nilai realisasi belanja modal di antara provinsi-provinsi di Indonesia merupakan hal yang wajar. Fenomena tersebut terjadi karena setiap daerah memiliki perbedaan profil kapabilitas fiskal dan kebutuhan aktual akan belanja modal yang diperlukan. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan pembangunan manusia, idealnya setiap pemerintah daerah seharusnya memiliki nilai belanja modal yang terus meningkat setiap tahunnya supaya dapat dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan publik yang dapat memperbaiki kesejahteraan penduduknya (Nina dan Rustariyuni, 2018).

Selain dari sisi pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan indeks pembangunan manusia. Faktor tersebut adalah permasalahan kemiskinan. Menurut Pudjianto dan Syawie (2015) kemiskinan merupakan penghambat pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan kemiskinan akan menyebabkan kualitas hidup seseorang mengalami penurunan sehingga keseluruhan dimensi IPM, yakni dimensi pendidikan, kesehatan, dan daya beli akan menjadi lebih rendah. Pada tahun 2019 beberapa provinsi di Indonesia masih belum berhasil mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di daerahnya. Provinsi dengan tingkat persentase kemiskinan yang tinggi mayoritas berada pada Kawasan Timur Indonesia (KTI), yakni Provinsi Papua 26,55 persen, Provinsi Papua Barat 21,51 persen, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur 20,62 persen. Kondisi demikian merupakan tantangan yang perlu dihadapi pemerintah dalam upaya memperbaiki kualitas pembangunan manusia di Indonesia.

Sejalan dengan hal yang sudah dipaparkan sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Muda, dkk (2014) mendapatkan kesimpulan bahwa meningkatnya

PDRB dan bertambahnya belanja modal akan memberi pengaruh positif terhadap kenaikan IPM. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Bhakti, dkk (2012) yang mendapati bahwa terdapat hubungan searah dan positif antara PDRB dan IPM.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Omodero (2019) bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap IPM.

Kondisi seperti ini dapat terjadi jika penggunaan belanja modal belum sepenuhnya digunakan pada bidang-bidang yang menyangkut kesejahteraan publik.

Penelitian lainnya yang memiliki relevansi kuat mengenai topik ini dilakukan oleh Muliza, dkk (2017) dengan menitikberatkan adanya pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap IPM. Hasilnya ditemukan bahwa ketika jumlah penduduk miskin berkurang maka nilai IPM pada suatu wilayah akan mengalami peningkatan. Dengan kata lain, terdapat hubungan negatif antara jumlah penduduk miskin dan IPM.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan masih adanya perbedaan dalam hasil penelitian terdahulu maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis fenomena tersebut. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel tingkat persentase kemiskinan, pemutakhiran data, dan perluasan cakupan objek penelitian. Oleh karena itu, judul penelitian yang dibuat adalah "Analisis Pengaruh PDRB, Belanja Modal, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2019".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan dalam latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap IPM pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2014-2019?
2. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap IPM pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2014-2019?
3. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap IPM pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2014-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap IPM pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2014-2019.
2. Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap IPM pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2014-2019.
3. Menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap IPM pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2014-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada bidang-bidang tertentu yang memiliki relevansi erat dengan topik penelitian ini. Beberapa bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi bidang akademis, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan pada bidang ekonomi, tepatnya pada topik Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Bagi bidang kebijakan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk rekomendasi kebijakan dalam lingkup pemerintah provinsi di Indonesia, khususnya pada bahasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Bagi bidang penelitian, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi sehingga penelitian selanjutnya dapat mendapatkan aspek kebaruan (*novelty*) yang berbeda baik dari penggunaan variabel, tahun, dan objek penelitian.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Manusia

2.1.1 Konsep Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah paradigma pembangunan yang memusatkan perhatian pada sumber daya manusia (penduduk) sebagai penerima manfaat utama hasil pembangunan yang berupa peningkatan literasi, perbaikan kesehatan, dan pemenuhan nutrisi yang lebih baik (Meier dan Stiglitz dikutip dalam Kuncoro, 2010). Paradigma pembangunan manusia dilandasi oleh empat prinsip yang tidak dapat terpisahkan, yaitu peningkatan produktivitas, berkesinambungan, pemerataan pendapatan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995).

Pada implementasinya, menurut Amartya Sen dalam bukunya yang berjudul *development as freedom* mengungkapkan bahwa pembangunan manusia dapat berjalan dengan optimal ketika setiap penduduk dapat terbebas dari belenggu keterbatasan yang sangat ditentukan oleh faktor sosial seperti perbedaan kesempatan ekonomi, kemiskinan, dan keterbelakangan. Dalam mengatasi hal tersebut, setiap penduduk perlu diberi perluasan kebebasan untuk mencapai

kapabilitas aktualnya melalui edukasi, budaya hidup sehat, dan keleluasaan dalam berinisiatif (Sen, 1999).

2.1.2 Teori Indeks Pembangunan Manusia

Dalam rangka untuk mengupayakan pembangunan manusia secara universal, United Nation Development Program membentuk alat ukur yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini merupakan suatu bentuk perwujudan dari beberapa capaian yang dianggap memiliki kontribusi paling besar terhadap pembangunan manusia. Capaian tersebut adalah berpendidikan, harapan hidup yang panjang, dan berpendapatan tinggi. Ketika penduduk menerima ketiga capaian tersebut, kemungkinan besar mereka dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap peluang-peluang lainnya sehingga mereka dapat merasakan penghidupan yang layak (UNDP, 1990).

Adapun menurut Todaro dan Smith (2014) IPM adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur capaian pembangunan yang didasarkan oleh aspek sosial dan aspek ekonomi masyarakatnya. Pada sisi sosial dinilai melalui indikator bidang pendidikan dan kesehatan. Kemudian pada sisi ekonomi diukur menggunakan pendapatan perkapita yang telah disesuaikan. Penggunaan perspektif dari kedua aspek inilah yang membuat IPM secara komprehensif mampu menggambarkan realitas pembangunan yang sebenarnya.

Dalam penggunaannya, manfaat utama dari IPM adalah untuk melihat seberapa jauh derajat keberhasilan pembangunan manusia pada wilayah tertentu. Semakin tinggi nilai IPM yang diperoleh maka menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia pada daerah tersebut semakin baik dan berlaku juga sebaliknya semakin rendah nilai IPM yang diperoleh menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia pada daerah tersebut semakin buruk.

2.1.3 Komponen Penyusun IPM

Dalam perkembangannya, pada tahun 2010 telah terjadi perubahan dalam komposisi penyusunan IPM. Hal ini terjadi karena variabel pembentuk indikator pada metode sebelumnya, yakni produk domestik bruto perkapita, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan untuk menggambarkan tingkat kualitas manusia yang sebenarnya. Melalui metode baru, menurut Badan Pusat Statistik (2019) IPM diukur menggunakan beberapa indikator, yaitu:

1. Indikator Kesehatan

Taraf kesehatan masyarakat direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup (UHH). Umur harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan seberapa lama seseorang dapat menjalani kehidupannya yang dihitung dalam satuan tahun. Dalam pengukurannya, UHH dihitung melalui pendekatan tidak langsung dengan menggunakan data Anak Masih Hidup (AMH) dan Anak Lahir Hidup (ALH). Semakin

tinggi nilai UHH menunjukkan bahwa taraf kesehatan masyarakat menjadi semakin membaik dan berlaku juga sebaliknya. Adapun UHH memiliki batas nilai tertentu sesuai dengan standar UNDP, yakni batas maksimum sebesar 85 tahun dan batas minimum sebesar 20 tahun.

2. Indikator Pendidikan

Indikator pendidikan menggambarkan tingkat edukasi di masyarakat. Hal ini dapat diukur melalui dua variabel. *Pertama*, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang memperkirakan banyaknya jumlah tahun yang akan didapatkan anak pada rentang usia tertentu untuk bersekolah. Dalam pengukurannya, HLS dihitung menggunakan data penduduk yang berumur 7 tahun ke atas. Adapun HLS memiliki batas nilai tertentu sesuai dengan standar UNDP, yakni batas maksimum sebesar 18 tahun dan batas minimum sebesar 0 (nol) tahun. *Kedua*, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menghitung seberapa lama pendidikan formal yang telah ditempuh oleh suatu penduduk. Dalam pengukurannya, RLS dihitung menggunakan data penduduk berumur 25 tahun ke atas. Adapun RLS memiliki batas nilai tertentu sesuai dengan standar UNDP, yakni batas maksimum sebesar 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 (nol) tahun.

3. Indikator Standar Hidup Layak

Standar hidup layak direpresentasikan oleh variabel pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*). Kemampuan daya beli tersebut telah dihitung berdasarkan 30 komoditas bukan makanan dan 66

komoditas makanan dengan memperhatikan harga riil yang berlaku pada wilayah tertentu. Adapun besaran pengeluaran perkapita memiliki batas nilai tertentu yang ditetapkan BPS, yakni batas maksimum sebesar Rp26.572.352,00 dan batas minimum Rp1.007.436,00 dimana batas maksimum didasarkan pada pengeluaran perkapita Kota Jakarta Selatan dan batas minimum didasarkan pada pengeluaran perkapita Kabupaten Tolikara.

2.1.4 Tata Cara Perhitungan IPM

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2019) proses perhitungan IPM diawali dengan melakukan penghitungan pada masing-masing indikator penyusunnya. Perhitungan setiap indikator tersebut dilakukan dengan memperhatikan bobot nilai minimum dan maksimum tertentu sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebagai berikut ini:

Tabel 2. 1: Nilai Minimum dan Maksimum Komponen Penyusun IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Sumber : Diadaptasi dari BPS (2019).

Setelah diketahui nilai bobot maksimum dan minimum dari masing-masing indikator penyusun IPM maka selanjutnya dilakukan perhitungan dengan membandingkan nilai selisih suatu indikator pada tahun tertentu dan nilai minimumnya dengan nilai selisih maksimum dan minimum dari indikator yang bersangkutan. Formulasinya adalah sebagai berikut:

$$\text{Dimensi kesehatan: } I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\text{Min}}}{AHH_{\text{Max}} - AHH_{\text{Min}}}$$

$$\text{Dimensi Pendidikan: } I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\text{Min}}}{HLS_{\text{Max}} - HLS_{\text{Min}}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\text{Min}}}{RLS_{\text{Max}} - RLS_{\text{Min}}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

$$\text{Dimensi Standar Hidup Layak: } I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{Pengeluaran}) - \ln(\text{Pengeluaran}_{\text{Min}})}{\ln(\text{Pengeluaran}_{\text{max}}) - \ln(\text{Pengeluaran}_{\text{Min}})}$$

Pada tahapan selanjutnya, nilai masing-masing indikator tersebut disubstitusikan ke dalam rumus IPM yang dihitung menggunakan metode rata-rata geometrik. Hal ini bertujuan untuk menghindari bias yang ditimbulkan dari adanya ketimpangan yang terjadi antara indikator penyusun IPM. Dengan kata lain, nilai capaian indikator tertentu yang bernilai lebih rendah tidak dapat ditutupi oleh nilai capaian indikator lainnya yang bernilai lebih tinggi. Dalam perhitungannya digunakan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} + I_{\text{Pendidikan}} + I_{\text{Pengeluaran}}} \times 100$$

Hasil perhitungan IPM memiliki skala dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus). Semakin mendekati nilai 100 maka pembangunan manusia

pada wilayah tersebut semakin baik dan berlaku juga hal sebaliknya. Adapun nilai capaian tersebut diklasifikasikan dalam 4 kategori, yakni:

1. $IPM < 60$: IPM rendah.
2. $60 < IPM < 70$: IPM sedang.
3. $70 < IPM < 80$: IPM tinggi.
4. $IPM > 80$: IPM sangat tinggi.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Ahli ekonomi klasik secara umum memusatkan perhatian pada empat faktor utama yang dianggap berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu penduduk, persediaan barang modal, ketersediaan tanah, dan sumber daya alam.

Masing-masing pandangan ahli ekonomi klasik adalah sebagai berikut:

1) Menurut Adam Smith

Adam Smith dalam Kuncoro (2010) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai keadaan dimana terjadinya peningkatan kemakmuran pada suatu negara yang dicerminkan melalui meningkatnya total produksi. Hal ini dapat tercapai ketika suatu negara mampu menggunakan sumber daya alam dan manusia (tenaga kerja)

secara efisien dalam melakukan kegiatan produksi melalui spesialisasi atau pembagian kerja.

2) Menurut David Ricardo

David Ricardo menjelaskan hubungan keterkaitan antara jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi dalam sebuah perekonomian. Pada awalnya tingginya jumlah penduduk akan menyebabkan output produksi dalam perekonomian meningkat, akan tetapi ketika jumlah penduduk mengalami peningkatan yang lebih banyak secara relatif jika dibandingkan dengan faktor produksi lainnya maka akan terjadi fenomena "*law of diminishing return*" yang mengakibatkan produktivitas dari setiap penduduk menurun sehingga dapat berpengaruh negatif terhadap perekonomian (David Ricardo dikutip dalam Sukirno, 2006).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Ahli ekonomi neoklasik, yaitu Joseph Schumpeter, Harrod Domar, Robert Solow, dan Trevor Swan melakukan penyempurnaan teori yang dikemukakan oleh para ekonom klasik sebelumnya. Beberapa teori yang dikembangkan adalah sebagai berikut ini:

1) Menurut Schumpeter

Joseph Schumpeter memusatkan perhatiannya pada peran pengusaha dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peran tersebut dapat dijelaskan dalam

dua tahapan. *Pertama*, pengusaha menciptakan inovasi yang akan mengarahkan kegiatan produksi untuk menjadi lebih efisien. Bentuk inovasi tersebut antara lain seperti mekanisme pengelolaan sumber daya, memperluas pangsa pasar, dan pengembangan kualitas barang serta jasa. *Kedua*, inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha tersebut kemudian akan menarik minat perusahaan lain dan penduduk untuk melakukan penanaman modal dalam rangka memperoleh imbal hasil keuntungan. Hal ini akan mendorong meningkatnya kegiatan investasi dalam suatu negara yang pada akhirnya juga akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi (Joseph Schumpeter dikutip dalam Sukirno, 2006).

2) Menurut Harod Domar

Harod Domar menitikberatkan pada penciptaan keadaan pertumbuhan ekonomi yang stabil (*steady growth*). Kondisi tersebut dapat terwujud ketika tersedianya investasi yang memadai dalam perekonomian. Dalam teori ini, pemberlakuan investasi pada tahun tertentu dimanfaatkan untuk mengakumulasi persediaan kapasitas barang modal pada tahun mendatang yang secara matematis dirumuskan sebagai $AE=C+I+\Delta I$, artinya bertambahnya investasi dalam perekonomian akan meningkatkan pengeluaran agregat secara berkelanjutan (Harrod Domar dikutip dalam Sukirno, 2006).

3) Menurut Solow-Swan

Robert Solow dan Trevor Swan menjelaskan hubungan interaksi di antara faktor produksi tenaga kerja, penambahan stok modal, dan perkembangan

kemajuan teknologi dalam suatu perekonomian. Dalam teori ini, penambahan faktor produksi berupa tenaga kerja dan modal bukanlah faktor terpenting bagi pertumbuhan ekonomi. Faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan teknologi dan peningkatan keahlian tenaga kerjanya. Pada awalnya memang tenaga kerja dan penambahan stok modal diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sampai pada tahap kondisi pertumbuhan yang stabil (*steady growth*), akan tetapi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi diperlukan aspek perkembangan teknologi untuk melakukan produksi. Adapun persamaan yang dibentuk dari teori ini ialah $Y=f[(K,L)T]$, dimana kemajuan teknologi dianggap sebagai pengaruh eksternal. Oleh karena itu, teori ini dikenal juga sebagai *exogenous growth model*. Dalam teori ini perkembangan teknologi dan tenaga kerja yang terampil akan membuat output produksi bertambah besar (Robert Solow dan Trevor Swan dikutip dalam Kuncoro, 2010).

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

Teori pertumbuhan ekonomi modern merupakan pengembangan dari teori pertumbuhan neoklasik. Ahli ekonomi modern, Paul Romer dalam Kuncoro (2010) mengutamakan aspek pengetahuan dan teknologi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Romer memasukkan peran teknologi ke dalam model solow sehingga teori ini dikenal juga sebagai *endogenous growth model*. Dalam teori ini, teknologi dan modal ide pengetahuan (*knowledge capital*) pada tenaga kerja sangat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya produksi marginal yang menurun (*diminishing marginal productivity*) dari modal fisik yang ada pada teori neoklasik sehingga pertumbuhan ekonomi tetap dapat mengalami peningkatan secara

berkelanjutan melalui terciptanya efek skala hasil yang meningkat (*increasing return to scale*) yang terjadi dalam kegiatan produksi.

2.3 Produk Domestik Regional Bruto

2.3.1 Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Sukirno (2006) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu wilayah pada satu tahun tertentu. PDRB dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, PDRB atas dasar harga konstan yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga suatu tahun dasar tertentu. *Kedua*, PDRB atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun (BPS, 2018).

2.3.2 Pendekatan Perhitungan PDRB

Menurut Badan Pusat Statistik (2018) terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur besaran PDRB, yaitu:

1) Metode Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran merupakan metode perhitungan yang dilakukan dengan menjumlahkan keseluruhan komponen nilai pengeluaran akhir yang

dilakukan oleh pemerintah, rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, dan rumah tangga luar negeri dalam suatu wilayah pada tahun tertentu.

2) Metode Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi merupakan metode perhitungan yang dilakukan dengan menjumlahkan keseluruhan nilai tambah atas produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi yang beroperasi dalam suatu wilayah pada tahun tertentu.

3) Metode Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan merupakan metode perhitungan yang dilakukan dengan menjumlahkan nilai balas jasa akhir yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam suatu wilayah pada tahun tertentu. Bentuk balas jasa tersebut adalah berupa pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan jenis perolehan pendapatan lainnya.

2.3.3 Manfaat PDRB

PDRB merupakan parameter untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam suatu daerah pada suatu tahun tertentu. Pada umumnya, PDRB digunakan untuk melihat struktur perekonomian dan mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi yang berlangsung pada suatu daerah. Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, PDRB dihitung atas dasar harga konstan (nilai riil) dengan menggunakan suatu

tahun dasar tertentu untuk menghilangkan adanya pengaruh inflasi sehingga dapat lebih akurat dalam mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Rumus dari perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

$$\text{Laju pertumbuhan ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan: PDRB_t: PDRB tahun tertentu.

PDRB_{t-1}: PDRB tahun sebelumnya.

2.4 Pengeluaran Pemerintah

2.4.1 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989) keterlibatan langsung pemerintah melalui aspek pengeluarannya sangat dibutuhkan, terutama ketika terjadinya permasalahan dalam perekonomian. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting untuk mengarahkan jalannya perekonomian ke arah yang lebih baik. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa teori mengenai pengeluaran pemerintah:

1. Teori Keynes

Keynes dalam Mankiw (2006) mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam mempengaruhi dan mengarahkan proses kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung di suatu negara. Teori ini dapat dipahami melalui persamaan keseimbangan $Y=AE=C+I+G+(X-M)$. Pengeluaran pemerintah merupakan stimulus untuk meningkatkan pengeluaran agregat, terutama saat terjadi perlambatan ekonomi yang menyebabkan tingkat pengeluaran agregat menjadi lebih rendah daripada yang sebenarnya dibutuhkan untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh.

Peningkatan pada pengeluaran agregat akan membuat perusahaan cenderung untuk meningkatkan kapasitas produksinya (ekspansi) untuk mengimbangi output barang dan jasa yang diminta dalam perekonomian. Ekspansi yang terjadi dalam perekonomian akan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Hal ini akan terus berlangsung sampai pengeluaran agregat dan pendapatan nasional mencapai titik keseimbangan.

2. Teori Rostow dan Musgrave

Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesoebroto (1993) menerangkan hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pembangunan ekonomi. Hubungan tersebut terbagi dalam tiga tahapan, yaitu fase awal, fase menengah, dan fase lanjutan. Pada fase awal pembangunan, pemerintah berkewajiban mengalokasikan

belanjanya dalam jumlah yang besar untuk pembentukan aset fisik atau barang modal dalam rangka menyediakan infrastruktur pelayanan dasar seperti sarana transportasi, pembuatan jalan raya, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Hal demikian terjadi karena peran swasta dalam perekonomian masih sangat minim sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberi dukungan pada keberlangsungan aktivitas perekonomian dan pembangunan, salah satunya dengan penyediaan infrastruktur.

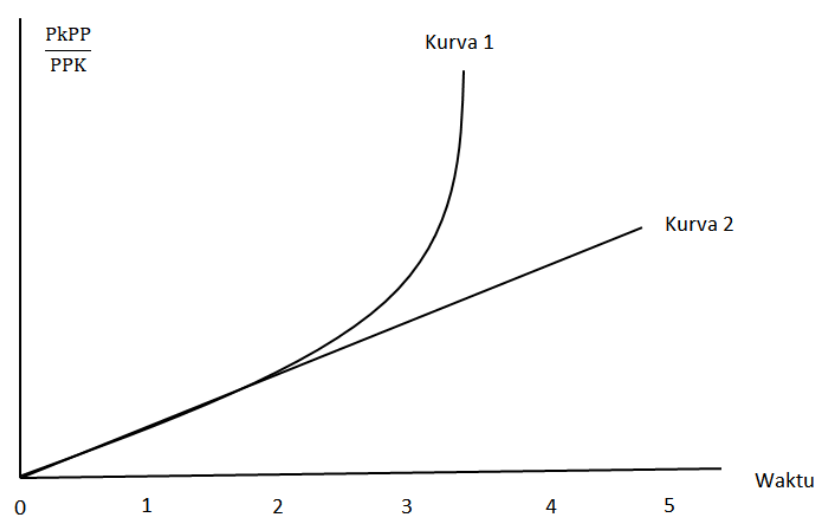
Pada fase pembangunan menengah, perekonomian sudah mulai berkembang dan investasi swasta sudah memiliki peran besar dalam kegiatan perekonomian. Meskipun demikian, berkembangnya kegiatan ekonomi tersebut menyebabkan hubungan antar sektor ekonomi menjadi semakin rumit karena adanya permasalahan berupa eksternalitas negatif dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, pada tahap ini pengeluaran pemerintah akan menjadi semakin meningkat sebab pemerintah berupaya untuk mengatasi pengaruh negatif dari permasalahan yang terjadi.

Pada fase pembangunan lanjutan, ketika pembangunan ekonomi sudah mencapai keadaan yang mapan maka pengeluaran pemerintah akan beralih dari pengeluaran yang berupa belanja modal menjadi pengeluaran dalam bentuk belanja operasional dan belanja bantuan sosial yang diperuntukkan pada bidang yang berkaitan langsung terhadap kesejahteraan masyarakat seperti program subsidi, pemberian jaminan sosial, dan jaminan hari tua.

3. Teori Adolph Wagner

Adolph Wagner menjelaskan hubungan keterkaitan antara tingkat pendapatan perkapita dan pengeluaran pemerintah. Dalam teori ini, ketika pendapatan perkapita meningkat maka pengeluaran pemerintah juga akan turut mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena peningkatan pendapatan perkapita merupakan refleksi dari berkembangnya aktivitas perekonomian yang pada umumnya diikuti juga oleh semakin kompleksnya hubungan antar industri dengan industri, industri dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah akan semakin besar karena pemerintah berkewajiban untuk mengatur hubungan yang kompleks di masyarakat melalui penganggaran belanja pada bidang hukum, bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan kebudayaan.

Gambar 2. 1: Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah



Sumber: Diadaptasi dari Mangkoesebroto (1993).

Lebih lanjut lagi, jika dilihat pada gambar 2.1 maka dapat diketahui bahwa teori pengeluaran wagner bersifat eksponensial seperti yang ditunjukkan oleh kurva 1 dan bukan bersifat linear seperti yang ditunjukkan oleh kurva 2. Kondisi demikian terjadi karena pengeluaran pemerintah akan terus mengalami peningkatan yang semakin cepat dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan dari pendapatan perkapita masyarakatnya (Adolph Wagner dalam Mangkoesoebroto, 1993). Secara matematis, teori ini diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{P_{KPP_1}}{PPK_1} < \frac{P_{KPP_2}}{PPK_2} < \dots < \frac{P_{KPP_n}}{PPK_n}$$

Dimana:

P_{KPP} : Pengeluaran pemerintah perkapita.

PPK : Pendapatan perkapita.

1,2,...n : Waktu (tahun).

2.4.2 Konsep Belanja Modal

Pengeluaran pemerintah yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembangunan adalah belanja modal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dianggarkan oleh pemerintah untuk menyediakan aset tetap dan aset lainnya yang diperoleh melalui kegiatan pengadaan atau pembelian. Belanja ini bersifat jangka panjang yang artinya nilai pemanfaatannya lebih dari satu tahun. Berikut ini merupakan jenis-jenis dari belanja modal, yaitu:

- 1) Belanja modal tanah ialah pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian dan perolehan hak atas tanah dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah yang meliputi seluruh biaya administrasinya sampai siap untuk digunakan.
- 2) Belanja modal peralatan dan mesin ialah pengeluaran untuk penyediaan alat dan mesin untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah yang meliputi biaya pengangkutan sampai dengan instalasi sehingga dalam kondisi siap untuk digunakan.
- 3) Belanja modal bangunan dan gedung ialah pengeluaran untuk pengadaan gedung dan bangunan yang dimaksudkan untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah yang meliputi biaya awal pembangunan sampai siap untuk digunakan.
- 4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan ialah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka penyediaan jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah dan dikuasai oleh pemerintah yang meliputi biaya awal pembangunan sampai siap untuk digunakan.
- 5) Belanja modal aset tetap lainnya ialah jenis belanja modal yang memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dari klasifikasi belanja modal yang telah dijelaskan sebelumnya. Belanja modal aset tetap lainnya diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap untuk digunakan.

6) Belanja aset lainnya ialah belanja yang digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.5 Kemiskinan

2.5.1 Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan yang dialami individu dalam memperoleh barang, jasa, dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak (Levitan dikutip dalam Suyanto, 2001). Berdasarkan definisi tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidaksanggupan individu dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mendasarnya yang diukur melalui kemampuan pengeluaran perkapita perbulan. Ketika individu melakukan pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan maka individu tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok individu miskin. Adapun menurut Todaro dan Smith (2014) kemiskinan terbagi menjadi dua jenis. *Pertama*, kemiskinan absolut ialah keadaan dimana kemampuan pengeluaran individu berada di bawah garis kemiskinan sehingga kebutuhan mendasarnya tidak terpenuhi untuk mencapai standar hidup layak. *Kedua*, kemiskinan relatif ialah keadaan dimana kemampuan pengeluaran individu sudah melampaui garis kemiskinan dan kebutuhan hidup mendasarnya sudah dapat terpenuhi, akan tetapi secara relatif standar hidupnya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat di sekitarnya.

Pada kenyataan yang sebenarnya, kemiskinan tidak hanya dimaknai melalui aspek ekonomi semata, akan tetapi juga melalui aspek lainnya. Menurut Bank Dunia (2000) kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi, yaitu mencakup tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, kondisi kerentanan, dan keadaan ketidakberdayaan. Keseluruhan aspek multidimensional tersebut merupakan perluasan ukuran kemiskinan yang berfungsi sebagai indikator penting dalam memahami fenomena kemiskinan secara lebih akurat dan mendalam.

2.5.2 Penyebab dan Dampak Kemiskinan

1. Teori Perangkap Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Cycle Poverty Trap*)

Nurkse dalam Jhingan (2016) mengemukakan bahwa penduduk dalam suatu negara akan mengalami kesulitan untuk bangkit dari kemiskinan dikarenakan adanya perangkap lingkaran setan kemiskinan (*vicious cycle poverty trap*). Dalam teori ini, penduduk yang berada di negara miskin cenderung memiliki risiko yang lebih besar untuk terperangkap dalam kemiskinan. Berdasarkan gambar 2.2 perangkap kemiskinan tersebut akan berlangsung secara siklikal melalui dua saluran.

Pertama, melalui saluran permintaan. Awalnya rendahnya pendapatan masyarakat akan menyebabkan permintaan barang dan jasa secara agregat mengalami penurunan. Ketika permintaan agregat berkurang maka perekonomian akan mengalami kontraksi sehingga rumah tangga produksi tidak memiliki keinginan

untuk melakukan ekspansi usaha. Kondisi seperti ini akan mengurangi kecenderungan berinvestasi di negara tersebut sehingga pembentukan modal (*capital stock*) menjadi terbatas. Dampaknya adalah produktivitas dalam perekonomian akan menjadi rendah dan tingkat pendapatan masyarakat juga akan tetap berada pada kondisi yang rendah.

Kedua, melalui saluran penawaran. Awalnya rendahnya pendapatan masyarakat akan menyebabkan tingkat tabungan nasional menjadi rendah. Ketika tingkat tabungan nasional rendah maka sumber dana untuk pembiayaan investasi menjadi berkurang sehingga pembentukan modal (*capital stock*) menjadi terbatas. Efeknya adalah produktivitas dalam perekonomian akan menurun dan tingkat pendapatan masyarakat akan tetap stagnan pada kondisi rendah.

Gambar 2. 2: Diagram Siklus Perangkap Kemiskinan



Gambar A. Melalui sisi permintaan

Gambar B. Melalui sisi penawaran

Sumber: Diadaptasi dari Jhingan (2016).

Kedua saluran tersebut merupakan siklus perangkap kemiskinan yang akan terjadi secara terus menerus pada suatu negara sehingga penduduk yang berada pada negara tersebut cenderung memiliki kesulitan untuk melangsungkan hidupnya dan bangkit dari keterpurukan kemiskinan.

2. Teori Perangkap Deprivasi Kemiskinan (*Poverty Deprivation Trap*)

Chambers (1983) mengungkapkan faktor-faktor penyebab kemiskinan secara lebih komprehensif melalui teori perangkap deprivasi kemiskinan. Melalui teori ini, permasalahan kemiskinan tidak hanya dipahami melalui perspektif ekonomi semata, akan tetapi juga melalui perspektif sosial masyarakatnya. Beberapa faktor penyebab kemiskinan diuraikan sebagai berikut:

1) Kemiskinan Itu Sendiri (*Household Poor*)

Keluarga miskin cenderung memiliki keterbatasan dalam kepemilikan aset produktif, kondisi fisik yang lemah, dan tingkat pendidikan yang rendah. Kondisi demikian akan menyebabkan mereka sulit untuk melangsungkan kehidupannya dan bangkit dari keterpurukan yang dialami. Dampaknya adalah individu yang berasal dari keluarga tersebut juga akan memiliki kecenderungan untuk terpuruk dalam kemiskinan dan semakin tertinggal oleh penduduk di sekitarnya yang secara relatif memiliki potensi lebih tinggi.

2) Ketidakberdayaan (*Powerless*)

Tidak meratanya persamaan hak dan keadilan dalam kehidupan bersosial menyebabkan penduduk tertentu menjadi tidak berdaya dan sulit untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh sumber-sumber ekonomi yang tersedia. Akibatnya penduduk tersebut akan sulit untuk melangsungkan hidupnya dan terpuruk dalam permasalahan kemiskinan.

3) Keterasingan (*Isolation*)

Lokasi geografis yang terisolasi akan menyebabkan penduduk di wilayah tersebut kesulitan untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Hal demikian terjadi karena wilayah yang terisolasi umumnya memiliki sejumlah permasalahan, antara lain seperti rendahnya aktivitas perekonomian, terbatasnya distribusi pangan yang dapat dijangkau dengan harga murah, dan minimnya fasilitas kesejahteraan.

4) Ketergantungan (*Dependence*)

Tingkat ketergantungan memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan. Ketika tingkat ketergantungan tinggi maka tingkat tanggungan penduduk akan memburuk sebab penduduk produktif perlu menggunakan sebagian pendapatannya untuk menanggung kebutuhan mereka yang belum produktif. Jumlah tanggungan yang besar tersebut menyebabkan pendapatan yang tersedia tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup minimum sehingga penduduk yang bersangkutan akan terpuruk dalam permasalahan kemiskinan.

5) Kerentanan (*Vulnerability*)

Kerentanan ialah ketidakmampuan yang dialami oleh penduduk untuk menghadapi kondisi yang bersifat darurat seperti bencana alam, kegagalan panen, dan penyakit kronis yang secara tidak terduga menimpa penduduk tersebut. Kondisi darurat yang terjadi dapat menyebabkan penduduk masuk dalam permasalahan kemiskinan, terutama bagi penduduk yang tidak memiliki dana cadangan (tabungan) karena umumnya diperlukan biaya ekonomi untuk mengatasi kondisi darurat yang berlangsung. Dalam menghadapi kondisi ini kerap kali penduduk tersebut akan menjual aset yang dimilikinya sehingga kehidupan mereka akan menjadi semakin terpuruk.

2.5.3 Pengukuran Kemiskinan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2018) kemiskinan di Indonesia diukur menggunakan pendekatan kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup dasar (*basic needs approach*). Dalam pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai keadaan dimana individu memiliki kemampuan pengeluaran di bawah garis kemiskinan sehingga individu yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mendasarnya. Berikut ini merupakan beberapa jenis indeks kemiskinan, yaitu:

- 1) Indeks persentase kemiskinan (*Head count index*), yakni indeks yang menghitung secara keseluruhan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

2) Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty gap index*), yakni indeks yang mengukur kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Semakin tinggi nilai indeks ini maka pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan dan berlaku juga sebaliknya.

3) Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty severity index*), yakni indeks yang mengukur persebaran jumlah pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini maka ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin melebar dan berlaku juga sebaliknya.

2.6 Hubungan Antar Variabel

2.6.1 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dan IPM

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan refleksi dari kinerja ekonomi yang berlangsung pada suatu daerah dan tolok ukur sejauh mana aktivitas ekonomi tersebut mampu meningkatkan kemakmuran masyarakatnya (Bhakti, dkk, 2012). Terjadinya peningkatan PDRB merupakan indikasi bahwa perekonomian sedang mengalami ekspansi yang akan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas perkapita sehingga pendapatan perkapita penduduk mengalami peningkatan. Ketika pendapatan perkapita meningkat maka semakin tinggi juga kemampuan penduduk dalam melakukan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan akan barang, jasa, dan pelayanan yang memadai untuk mencapai kehidupan yang layak.

Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ranis (2004) bahwa perkembangan perekonomian akan mempengaruhi pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduknya. Bertambahnya pendapatan akan mempengaruhi kecenderungan penduduk dalam menentukan jenis barang yang akan dibelanjakan. Pada umumnya penduduk akan meningkatkan pengeluaran konsumsinya pada barang, jasa, dan pelayanan yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan manusia, antara lain seperti makanan yang bernutrisi, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan memperoleh layanan kesehatan yang lebih berkualitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk domestik regional bruto memberi pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

2.6.2 Hubungan Belanja Modal dan IPM

Belanja modal merupakan salah satu jenis pengeluaran pemerintah yang berkaitan erat dengan pembangunan manusia. Dalam penggunaannya, belanja modal dimanfaatkan untuk menyediakan aset tetap yang berfungsi sebagai pilar-pilar pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Aset tetap tersebut digolongkan menjadi dua jenis. *Pertama*, berupa sarana dan prasarana yang pemanfaatannya berkaitan langsung dengan pelayanan publik seperti pembangunan gedung puskesmas, balai latihan kerja dan fasilitas kesejahteraan lainnya. *Kedua*, berupa sarana dan prasarana yang pemanfaatannya tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik, melainkan digunakan untuk keperluan aparaturnya seperti

pembangunan gedung kantor, pembelian kendaraan dinas dan keperluan birokrasi lainnya.

Melalui perspektif penganggaran partisipatif, upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas masyarakatnya dicerminkan melalui besaran anggaran belanja yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan publik. Hal ini dapat diwujudkan dalam pengeluaran belanja modal yang mencakup dimensi pembangunan manusia, yakni dimensi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Pada dimensi ekonomi, belanja modal dapat digunakan untuk menyediakan infrastruktur pelayanan umum seperti penyediaan jalan raya, transportasi, jaringan listrik, jaringan irigasi, dan aset fisik lainnya yang dapat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Keberadaan infrastuktur akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar arus laju distribusi barang, informasi, dan jasa sehingga memungkinkan perekonomian untuk berkembang pesat. Selain itu, kegiatan pembangunan infrastruktur juga akan membuka lapangan pekerjaan yang memerlukan banyak tenaga kerja. Tenaga kerja yang terserap akan memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk melakukan konsumsi sehingga taraf hidupnya meningkat. Jadi, secara tidak langsung penggunaan belanja modal akan menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian yang akan diikuti juga oleh peningkatan kemampuan ekonomi masyarakatnya.

Pada dimensi pendidikan dan kesehatan, belanja modal dapat digunakan untuk menyediakan fasilitas pelayanan dasar seperti sekolah negeri, puskesmas, dan fasilitas kesejahteraan lainnya. Tersedianya fasilitas tersebut akan memberikan

kesempatan yang merata bagi seluruh penduduknya untuk mendapatkan pelayanan yang memadai, terutama bagi penduduk miskin yang selama ini tidak dapat mengakses fasilitas sejenis yang berada di bawah pengelolaan sektor privat.

Bertambahnya fasilitas pendidikan akan meningkatkan jumlah anak yang dapat mengenyam pendidikan dan memperpanjang harapan lama sekolah mereka sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, bertambahnya fasilitas kesehatan akan memperluas keterjangkauan seluruh lapisan penduduk terhadap akses pelayanan medis sehingga kondisi fisik penduduk akan semakin baik dan harapan hidupnya semakin lama.

Sari dan Supadmi (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa belanja modal dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan capaian-capaian komponen penyusun IPM seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan prasarana kesejahteraan lainnya.

Pada akhirnya peningkatan realisasi belanja modal akan memperbesar kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan barang publik yang dapat menstimulasi pembangunan manusia secara berkesinambungan melalui peningkatan kualitas manusianya dan diikuti juga oleh penguatan kemampuan ekonomi masyarakatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

2.6.3 Hubungan Kemiskinan dan IPM

Kemiskinan merupakan faktor penghambat pembangunan manusia sebab permasalahan ini memiliki keterkaitan erat dengan rendahnya taraf kesejahteraan penduduk. Kondisi demikian terjadi karena dua hal. *Pertama*, penduduk miskin mengalami deprivasi kesejahteraan yang dicirikan oleh ketidakberdayaan, serba kekurangan, dan kelemahan fisik yang mengakibatkan kualitas hidupnya menjadi rendah. *Kedua*, penduduk miskin memiliki ruang gerak yang terbatas dalam kegiatan ekonomi sehingga mereka tidak mampu melangsungkan hidupnya dan bangkit dari keterpurukan yang diderita. Terjadinya hal demikian akan memperbesar potensi turunya ketiga capaian IPM, yakni capaian pendidikan, kesehatan, dan daya beli.

Adapun Chambers (1983) mengemukakan hal serupa bahwa kemiskinan merupakan pemutus individu untuk mendapatkan akses penghidupan layak yang diakibatkan oleh deprivasi kesejahteraan yang diderita dan ketidakmampuannya secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya seperti kebutuhan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan yang bersifat mendesak lainnya. Hilangnya akses terhadap penghidupan yang layak akan menyebabkan perkembangan pembangunan manusia menjadi terdistorsi.

Hal senada diungkapkan Suradi (2007) dalam penelitiannya bahwa permasalahan kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadaan ini akan berdampak pada menurunnya kualitas pembangunan manusia seperti terjadinya malnutrisi, tingkat edukasi yang

rendah, dan dampak negatif lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemiskinan memberi pengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia.

2.7 Penelitian Terdahulu

Omodero (2019) melakukan penelitian berjudul *government general spending and human development: a case study of Nigeria*. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah IPM dan variabel bebasnya, yakni alokasi belanja modal, belanja rutin, indeks persepsi korupsi, dan inflasi. Penelitian ini menggunakan waktu penelitian pada tahun 2003-2017. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel belanja modal dan inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IPM, kemudian variabel belanja rutin berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel indeks persepsi korupsi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM.

Pada lingkup mancanegara dengan cakupan yang lebih luas, Mustafa, dkk (2017) melakukan penelitian mengenai pembangunan manusia pada negara-negara di Asia. Judul penelitiannya ialah *growth, human development, and trade: the Asian experience*. Penelitian ini menggunakan waktu penelitian pada tahun 1970-2011. Metode yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM, kemudian kualitas modal manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM,

sedangkan variabel keterbukaan perdagangan berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap IPM.

Pada tingkat nasional, Bhakti, dkk (2012) melakukan penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia di Indonesia periode 2008-2012. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah IPM dan variabel bebasnya adalah PDRB, rasio ketergantungan, konsumsi pangan, belanja kesehatan, dan belanja pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode regresi data panel. Kesimpulan yang diperoleh adalah PDRB dan belanja kesehatan berpengaruh positif serta signifikan terhadap IPM, kemudian rasio ketergantungan dan konsumsi pangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan belanja pendidikan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IPM.

Secara lebih spesifik, beberapa penelitian mengenai IPM dilakukan pada lingkup provinsi supaya pembahasannya menjadi semakin terperinci. Baeti (2013) melakukan penelitian berjudul pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2007-2011. Dalam penelitian ini variabel yang dijelaskan ialah IPM dan variabel penjelasnya, yakni jumlah pengangguran, PDRB, dan pengeluaran pemerintah. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel jumlah pengangguran memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel PDRB dan pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap IPM. Adapun, pengaruh positif dan signifikan dari PDRB terhadap indeks pembangunan manusia juga dikonfirmasi oleh Rakhmadani (2018) dalam

penelitiannya yang berjudul analisis pengaruh produk domestik regional bruto, kesenjangan antar daerah dan pembiayaan sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Kesimpulan yang diperoleh adalah PDRB dan pembiayaan sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan kesenjangan antar daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM.

Muliza, dkk (2017) juga melakukan penelitian dengan tema serupa, akan tetapi menitikberatkan pada pentingnya pengaruh kemiskinan terhadap IPM. Judul penelitiannya adalah analisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat kemiskinan, dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh pada tahun 2010-2014. Variabel terikat yang digunakan ialah IPM dan variabel bebasnya, yaitu belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat kemiskinan, dan PDRB. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Kesimpulan yang didapatkan adalah belanja pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM, belanja kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM, kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

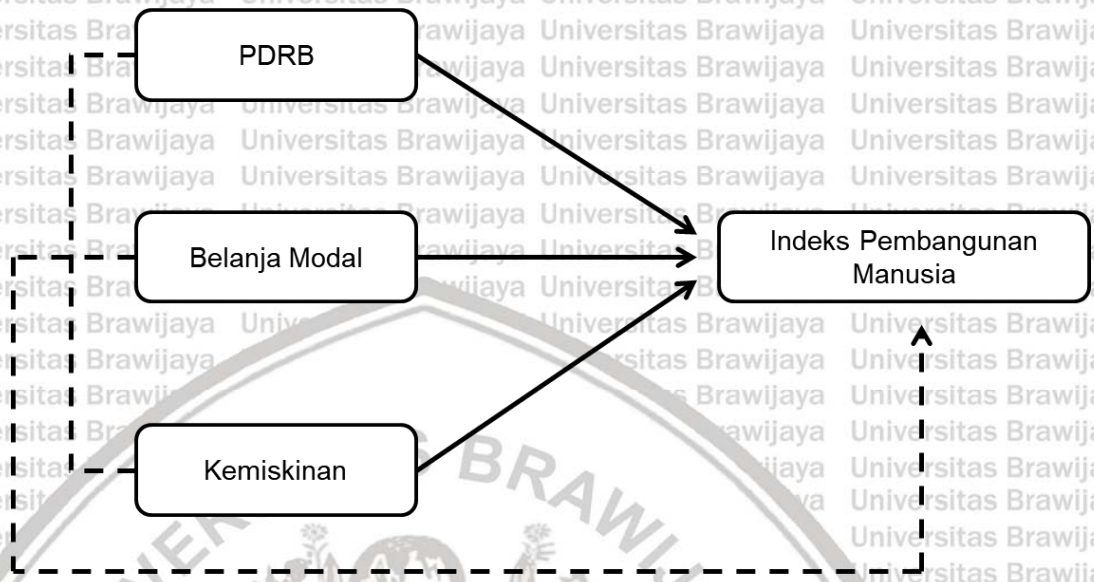
Muda, dkk (2014) dalam penelitiannya menerangkan adanya pengaruh hubungan belanja modal dan PDRB terhadap IPM. Judul penelitiannya adalah pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), pertumbuhan ekonomi, dan alokasi belanja modal terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2005-2010. Variabel yang dijelaskan ialah IPM dan variabel penjelasnya, yakni IKK, PDRB, dan

jumlah belanja modal. Metode yang digunakan ialah analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, kemudian variabel belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel IKK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM. Adanya pengaruh positif dari variabel belanja modal terhadap IPM juga diperkuat oleh Sari dan Supadmi (2016) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal pada peningkatan IPM di Provinsi Bali pada tahun 2009-2013. Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis regresi data panel. Kesimpulan yang didapatkan adalah pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

2.8 Kerangka Pemikiran

Secara konseptual, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah indeks komposit yang tersusun oleh indikator pendidikan, indikator kesehatan, dan indikator pengeluaran perkapita disesuaikan. Dengan berlandaskan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, ketiga indikator tersebut diduga dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja modal, dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran yang dibentuk adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 3: Kerangka Pemikiran



Keterangan:

- - - - -> = Pengaruh Simultan.
- > = Pengaruh Parsial.

Sumber: Sintesa penulis.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan tolok ukur dalam menilai kondisi perekonomian dalam suatu daerah. Peningkatan PDRB mengindikasikan bahwa perekonomian sedang mengalami ekspansi yang akan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas perkapita sehingga tingkat pendapatan penduduk mengalami peningkatan. Ketika pendapatan penduduk meningkat maka kemampuan daya belinya akan menguat (Setiawan dan Hakim, 2013).

Dalam realitasnya, adanya peran pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam mengoptimalkan pembangunan manusia. Dalam konteks ini, pemerintah dapat menggunakan aspek perbelanjaannya untuk mengatur jalannya kegiatan pembangunan manusia. Melalui pengeluaran belanja modal, pemerintah dapat menyediakan fasilitas publik yang menyangkut capaian-capaian dari dimensi pembangunan manusia seperti penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi masyarakat sehingga komponen penyusun IPM, yakni indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan indikator standar hidup layak akan mengalami peningkatan (Muda, dkk, 2014).

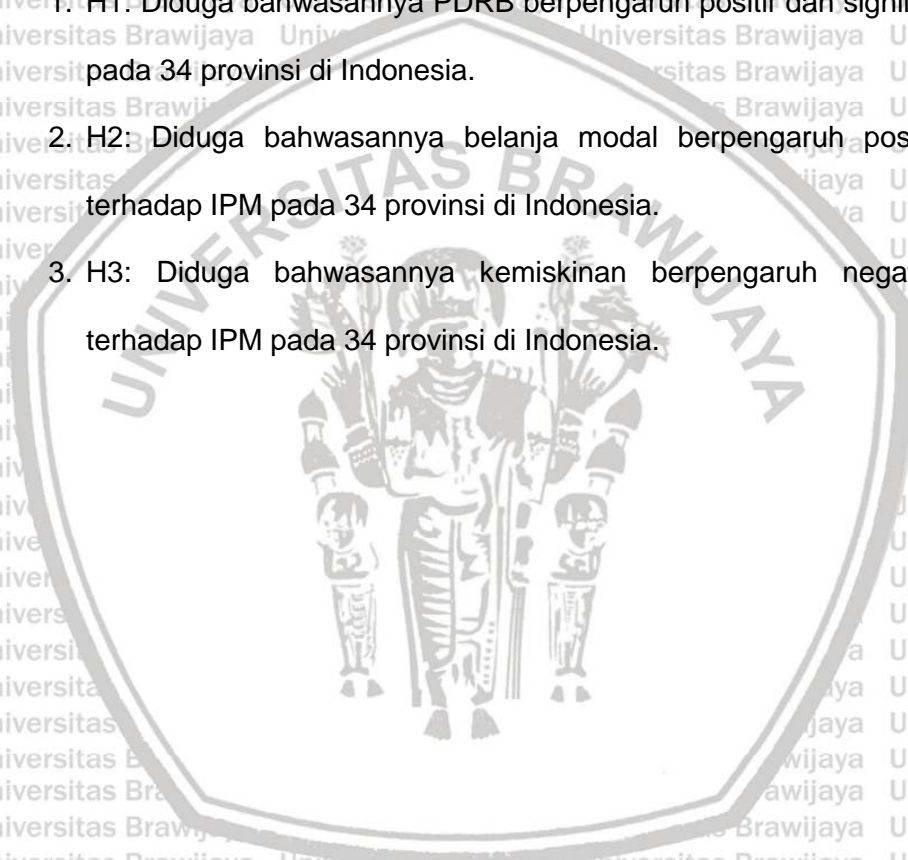
Adapun permasalahan dalam pembangunan manusia yang kerap dialami ialah permasalahan kemiskinan. Tingginya tingkat persentase kemiskinan akan menghambat program pembangunan manusia sebab kemiskinan menyebabkan taraf kesejahteraan seseorang menjadi lebih rendah yang dicirikan dengan kemampuan ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, dan kondisi kesehatan yang buruk. Keadaan ini pada akhirnya akan menurunkan nilai komponen penyusun IPM (Muliza, dkk, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, beberapa variabel tersebut diharapkan dapat menjelaskan perkembangan pembangunan manusia yang berlangsung di Indonesia secara komprehensif. Dengan demikian, pembangunan manusia dapat berjalan dengan optimal sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik.

2.9 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan sebelumnya maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. H1: Diduga bahwasannya PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada 34 provinsi di Indonesia.
2. H2: Diduga bahwasannya belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada 34 provinsi di Indonesia.
3. H3: Diduga bahwasannya kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM pada 34 provinsi di Indonesia.



BAB III**METODE PENELITIAN****3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010) pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berprinsip pada filsafat positivisme yang memandang sebuah fenomena secara konkrit dan terukur. Pendekatan kuantitatif dilakukan secara deduktif, yaitu dimulai dari penyusunan rumusan masalah, menetapkan landasan teori, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, dan menganalisis data menggunakan kaidah statistik (ekonometrika) sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan apakah hipotesis yang telah dirumuskan terbukti sesuai atau tidak.

3.2 Objek dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan 34 provinsi di Indonesia sebagai objek penelitian dalam rentang waktu selama enam tahun, yakni tahun 2014-2019. Dipilihnya seluruh provinsi sebagai objek penelitian dimaksudkan untuk mewakili kondisi pencapaian pembangunan manusia yang beragam, dimana terdapat provinsi dengan IPM berkategori sedang hingga kategori sangat tinggi. Hal ini juga bertujuan untuk membuat data penelitian yang digunakan menjadi lebih terdistribusi.

Selanjutnya, pemilihan tahun 2014-2019 sebagai waktu penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan dinamika perkembangan pembangunan manusia yang berlangsung, dimana dalam kurun waktu tersebut terdapat provinsi yang memiliki perkembangan IPM yang lambat dan terdapat juga provinsi dengan perkembangan IPM yang cepat. Dengan demikian harapannya penelitian ini dapat merepresentasikan keadaan indeks pembangunan manusia yang sebenarnya di Indonesia.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dibentuk untuk menyamakan pemahaman teori, menetapkan penggunaan satuan yang digunakan, dan memberi batasan-batasan tertentu pada variabel yang digunakan. Berikut ini adalah penjabaran dari setiap variabel yang digunakan:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang menggambarkan taraf pembangunan manusia pada suatu wilayah tertentu. IPM memiliki skala dengan nilai terendah nol (0,00) dan tertinggi seratus (100,00) yang secara eksplisit menerangkan bahwa semakin tinggi nilai indeks yang diperoleh maka akan diikuti juga oleh kualitas hidup manusianya yang semakin baik. Satuan pengukuran IPM adalah indeks poin.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu daerah pada satu tahun tertentu. Dalam penelitian

ini, PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010. Satuan pengukuran PDRB adalah rupiah.

3. Belanja modal adalah jumlah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk menyediakan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun. Satuan pengukuran belanja modal adalah rupiah.

4. Kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan yang dialami oleh individu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara minimal. Hal ini diukur dengan menghitung persentase penduduk secara keseluruhan yang berada di bawah garis kemiskinan. Satuan pengukuran kemiskinan adalah tingkat persentase kemiskinan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data jenis ini diperoleh secara tidak langsung. Data IPM, tingkat persentase kemiskinan, dan PDRB diperoleh melalui publikasi dokumen resmi ataupun laman resmi badan statistik dari masing-masing provinsi. Sedangkan, untuk data realisasi belanja modal diperoleh dari publikasi dokumen resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel yang merupakan perpaduan antara dua jenis data, yakni data silang dan data runtut waktu. Melalui metode ini, heterogenitas dari setiap subjek dapat dimunculkan dan kemudian dapat diukur pengaruhnya. Dalam penelitian ini subjek yang dimaksud adalah 34 provinsi di Indonesia. Menurut Gujarati dan Porter (2012) terdapat sejumlah keistimewaan ketika menggunakan regresi data panel, yaitu:

1. Meminimalisir timbulnya persoalan multikolinearitas.
2. Dapat mengukur perbedaan pengaruh dari setiap subjek.
3. Menghasilkan *degree of freedom* yang tinggi.
4. Alasan efisiensi dan lebih informatif.
5. Keberagaman variasi data.

Dalam penelitian ini, persamaan regresi yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = IPM (indeks poin).

X_{1it} = PDRB (rupiah).

X_{2it} = Belanja Modal (rupiah).

X_{3it} = Tingkat Kemiskinan (persentase).

α_0 = *Unobserved Factor*.

β_{1-3} = Koefisien, ϵ_{it} = Galat, t = Tahun, dan i = Individu/provinsi.

Menurut Widarjono (2005) ketika regresi data panel diimplementasikan maka akan timbul tiga kemungkinan model estimasi yang dapat dipergunakan, yakni model *common effect*, model *fixed effect*, dan model *random effect*. Dari setiap model estimasi itu memiliki kriteria serta konsekuensi yang berbeda dalam penggunaannya. Berikut ini penjabaran dari masing-masing model:

1. Model *Common Effect*

Model *common effect* adalah model yang mengasumsikan bahwa pengaruh waktu dan pengaruh individu dari masing-masing subjek diabaikan. Oleh karena itu model ini dianggap paling sederhana jika dikomparasikan dengan model lainnya.

Bentuk persamaan modelnya ialah:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \beta X_{it} + \epsilon_{it}$$

Pada model di atas dapat terlihat bahwa model ini tidak mampu menangkap nilai *unobserved factor* dari setiap subjek (*cross section unit*). Konsekuensi dari hal tersebut ialah perbedaan pengaruh individual dari setiap subjek menjadi tidak dapat diukur. Dalam penggunaannya, penduga ini diperoleh melalui *panel least square*.

2. Model *Fixed Effect*

Model *fixed effect* merupakan model yang mengasumsikan adanya pengaruh individu dari masing-masing subjek (*cross section unit*), akan tetapi mengabaikan pengaruh waktu (*time invariant*) yang digunakan. Perbedaan pengaruh individu tersebut diakomodir oleh penggunaan *dummy variable* pada saat dilakukannya estimasi sehingga model yang terbentuk ialah:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dapat dilihat pada model di atas terdapat komponen *dummy variable*, yakni $D=[d_1, d_2, \dots, d_n]$. Dimana *dummy variable* tersebut berfungsi untuk mewakili setiap subjek yang digunakan dalam model. Dengan demikian, perbedaan pengaruh individual menjadi dapat diukur melalui adanya α_i yang menangkap nilai *unobserved factor* dari setiap subjek (*cross section unit*). Dalam penerapannya, penduga ini didapatkan melalui *panel least square*.

3. Model *Random Effect*

Model *random effect* ialah model yang mengasumsikan bahwa variabel residual (*error term*) saling berhubungan, baik antar waktu maupun antar individu.

Dengan kata lain, heterogenitas dari masing-masing subjek (*cross section unit*) pada model ini dapat diakomodir oleh variabel residualnya (*error term*). Bentuk dari model ini, yaitu:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it} + \mu_i$$

Menjadi

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_k X_{kit} + V_{it}$$

Model di atas memiliki komposisi $V_{it} = \varepsilon_{it} + \mu_i$. Dimana ε_{it} merupakan residual secara menyeluruh dan μ_i merupakan residual secara individu yang bersifat tetap antar waktu (*time invariant*). Dengan demikian, perbedaan pengaruh individual menjadi dapat diukur melalui adanya α_i yang menangkap nilai *unobserved factor* dari setiap subjek (*cross section unit*). Dalam implementasinya, penduga ini diperoleh melalui panel EGLS.

3.5.2 Pemilihan Model Terbaik

Dalam penerapannya, metode regresi data panel akan menghasilkan tiga opsi model yang memungkinkan untuk digunakan. Ketiga opsi tersebut adalah model *common effect*, model *fixed effect*, dan model *random effect*. Oleh karena itu, menurut Widarjono (2005) perlu dilakukan beberapa pengujian untuk menemukan satu estimasi model yang dianggap paling sesuai di antara beberapa opsi estimasi model yang ada. Beberapa pengujian yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Uji Chow

Uji chow merupakan pengujian paling awal yang dilakukan dalam tahapan uji pemilihan model terbaik. Tujuan dari uji ini adalah untuk memilih model terbaik di antara model *common effect* dan model *fixed effect*. Konsep pengujian ini didasari oleh uji f-statistik yang membandingkan *residual sum of square* (RSS) antar dua regresi, dimana RSS 1 mewakili *common effect model* dan RSS 2 mewakili *fixed effect model*. Adapun formulasi dari uji ini adalah sebagai berikut:

$$F \text{ hitung} = \frac{(RSS1 - RSS2)/m}{(RSS2)/(n-k)}$$

Keterangan: m= numerator, dan n-k= denominator.

Hipotesis yang dirumuskan dalam uji chow adalah sebagai berikut :

H_0 : Model *Common Effect*.

H_1 : Model *Fixed Effect*.

Pengambilan keputusan atas hipotesis dalam uji chow ditentukan dengan membandingkan antara nilai Prob. Cross-section F dan nilai alpha ($\alpha=0,05$). Jika nilai Prob. Cross-section F < α (0,05) maka H_0 ditolak sehingga model *fixed effect* adalah yang terbaik, sebaliknya Jika nilai Prob. Cross-section F > α (0,05), maka H_0 diterima sehingga model *common effect* adalah yang terbaik.

2. Uji Hausman

Uji hausman ialah uji yang dilakukan untuk memilih model terbaik di antara model *random effect* dan model *fixed effect*. Konsep dari uji ini adalah membandingkan perbedaan kovarian dari estimasi *Ordinary Least Square* yang efisien dan estimasi *Generalized Least Squares* yang tidak efisien. Adapun formulasi dari uji ini adalah sebagai berikut:

$$m = \hat{q} \text{ var}(\hat{q})^{-1} \hat{q}$$

Dimana $\hat{q} = [\hat{\beta} - \hat{\beta}_{\text{GLS}}]$ dan $\text{Var}(\hat{q}) = \text{Var}(\hat{\beta}) - \text{Var}(\hat{\beta}_{\text{GLS}})$

Hipotesis yang dirumuskan dalam uji hausman adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *Random Effect*.

H_1 : Model *Fixed Effect*.

Pengambilan keputusan atas hipotesis dalam uji hausman ditentukan dengan membandingkan antara nilai Prob. Cross-section random dan nilai alpha ($\alpha=0,05$). Jika nilai Prob. Cross-section random $< \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak sehingga model fixed effect adalah yang terbaik, sebaliknya Jika Prob. Cross-section random $> \alpha$ (0,05), maka H_0 diterima sehingga model random effect adalah yang terbaik.

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji lagrange multiplier merupakan uji tambahan yang diwajibkan ketika hipotesis null pada uji hausman diterima atau dengan kata lain model random effect terpilih. Hal demikian menyebabkan belum ditemukannya kecocokan model sehingga perlu dilakukannya uji lanjutan. Adapun formulasi dari uji ini adalah sebagai berikut:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (Te_i^2)}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right)^2$$

Dimana n: jumlah individu.

T: jumlah periode waktu.

e: residual.

Hipotesis yang dirumuskan dalam uji lagrange multiplier adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *Common Effect*.

H_1 : Model *Random Effect*.

Pengambilan keputusan atas hipotesis dalam uji lagrange multiplier ditentukan dengan membandingkan antara nilai probabilitas Bresusch Pagan (BP) dan nilai alpha ($\alpha=0,05$). Jika nilai Prob. BP < α (0,05) maka H_0 ditolak sehingga model random effect adalah yang terbaik, sebaliknya Jika nilai Prob. BP > α (0,05), maka H_0 diterima sehingga model common effect adalah yang dipilih.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik merupakan kaidah statistik yang harus dipenuhi ketika melakukan regresi menggunakan pendekatan kuadrat terkecil (*ordinary least square*). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwasannya estimator yang digunakan dalam kegiatan peramalan (*forecasting*) bersifat efisien, yakni tidak bias dan konsisten. Menurut Gujarati dan Porter (2012) asumsi klasik yang perlu terpenuhi dalam regresi data panel adalah asumsi non-multikolinearitas, asumsi homoskedastisitas, dan asumsi normalitas. Sementara, khusus untuk data panel tidak memerlukan asumsi non-autokorelasi sebab autokorelasi hanya terjadi pada data runtut waktu (*time series*). Berikut ini merupakan uraian dari masing-masing uji asumsi klasik yang perlu dilakukan:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk memeriksa apakah kondisi residual dalam persamaan regresi memiliki distribusi yang normal atau tidak.

Kondisi dianggap baik ketika regresi yang digunakan memiliki residual yang terdistribusi normal. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi maka konsekuensinya adalah terjadinya masalah bias pada estimator, khususnya estimator dengan data sampel kecil. Adapun metode yang digunakan untuk menguji kondisi normalitas adalah uji Jarque-Bera (JB) dengan menggunakan hipotesis berikut:

H_0 : Residual terdistribusi normal.

H_1 : Residual tidak terdistribusi normal.

Pengambilan keputusan atas hipotesis dalam uji normalitas ditentukan dengan membandingkan antara nilai probabilitas Jarque Bera (JB) dan nilai alpha ($\alpha=0,05$). Jika nilai Prob. JB $>$ α (0,05) maka H_0 diterima sehingga residual berdistribusi normal, sebaliknya Jika nilai Prob. BP $<$ α (0,05), maka H_0 ditolak sehingga residual tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memeriksa apakah ada atau tidaknya korelasi yang erat di antara suatu variabel independen dengan variabel independen lainnya yang digunakan dalam model. Kondisi dianggap baik ketika tidak ditemukannya tingkat korelasi yang tinggi di antara masing-masing variabel independen. Adapun beberapa karakteristik dari permasalahan multikolinearitas, yakni:

- 1) Tingginya standar error.
- 2) Tanda koefisien variabel dalam regresi tidak bersesuaian dengan teori yang digunakan.
- 3) Koefisien determinasi memiliki nilai yang besar, akan tetapi hanya sedikit uji t statistik yang signifikan.

Upaya untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan melihat hasil uji koefisien korelasi antar variabel independennya. Apabila nilai koefisien korelasi masing-masing variabel independennya memiliki nilai yang lebih rendah dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa masalah multikolinearitas tidak terjadi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk memeriksa apakah varian pada residual memiliki ketidaksamaan atau tidak. Kondisi dianggap baik ketika variansi dari residual bernilai tetap ataupun sama (homoskedastis) di antara masing-masing pengamatan. Jika kondisi ini tidak terpenuhi maka estimator akan mengalami inefisiensi yang menyebabkan terjadinya *overestimate* maupun *underestimate* dalam kegiatan peramalan (*forecasting*). Adapun metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji glejser. Uji ini dilakukan dengan meregresikan seluruh variabel independen terhadap absolut residual sebagai variabel dependennya. Apabila nilai signifikansi antara setiap variabel independen terhadap variabel absolut residualnya bernilai lebih dari taraf kritis alpha ($\alpha=0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa masalah heteroskedastisitas tidak terjadi.

3.5.4 Pengujian Statistik

1. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) adalah uji yang bertujuan untuk mengevaluasi model regresi yang digunakan. Uji ini mengukur seberapa besar kemampuan dari keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam menerangkan variabel terikatnya. Dalam penerapannya, koefisien determinasi yang digunakan adalah *adjusted R²* yang menyempurnakan kekurangan dari R^2 biasa. Adapun rentang nilai pada uji ini berkisar di antara nilai 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), maknanya ialah semakin

mendekati nilai 1 maka semakin baik kemampuan keseluruhan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya dan berlaku juga sebaliknya.

2. Uji Statistik F

Uji statistik F ialah pengujian yang dilakukan untuk mengukur pengaruh simultan yang ditimbulkan dari seluruh variabel bebas yang digunakan di dalam persamaan regresi terhadap variabel terikatnya. Pada dasarnya, hasil uji statistik ini diperoleh dari rumus berikut:

$$F_{\text{Hitung}} = \frac{\text{Mean Square Regresi}}{\text{Mean Square Residual}}$$

Dengan hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) $H_0: \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$
- b) $H_1: \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$

Pengambilan keputusan atas hipotesis dalam uji ini adalah apabila nilai Prob. $f < \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Sebaliknya, apabila nilai Prob. $f > \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

3. Uji Statistik t

Uji statistik t ialah pengujian yang dilakukan untuk mengukur pengaruh parsial yang ditimbulkan dari setiap variabel bebas yang digunakan di dalam persamaan regresi terhadap variabel terikatnya. Pada dasarnya, hasil uji statistik ini diperoleh dari rumus berikut:

$$t_{hitung} = \frac{\hat{\beta}_k}{SE(\hat{\beta}_k)}$$

Dalam penelitian ini, perumusan hipotesis dari masing-masing variabel bebasnya adalah sebagai berikut:

Untuk variabel PDRB (X1)

- $H_0: \beta_1 = 0$, tidak terdapat pengaruh antara variabel PDRB dengan variabel IPM.
- $H_1: \beta_1 > 0$, terdapat pengaruh positif dari variabel PDRB terhadap variabel IPM.

Untuk variabel belanja modal (X2)

- $H_0: \beta_1 = 0$, tidak terdapat pengaruh antara variabel belanja modal dengan variabel IPM.
- $H_1: \beta_1 > 0$, terdapat pengaruh positif dari variabel belanja modal terhadap variabel IPM.

Untuk variabel tingkat persentase kemiskinan (X_3)

a) $H_0: \beta_1 = 0$, tidak terdapat pengaruh antara variabel tingkat persentase kemiskinan dengan variabel IPM.

b) $H_1: \beta_1 < 0$, terdapat pengaruh negatif dari variabel tingkat persentase kemiskinan terhadap variabel IPM.

Pengambilan keputusan atas hipotesis dalam uji ini adalah apabila nilai $\text{Prob. } t < \alpha (0,05)$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel independen secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

Sebaliknya, apabila nilai $\text{Prob. } t > \alpha (0,05)$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang terletak di Benua Asia. Sebagai negara besar, Indonesia memiliki luas 1,9 juta kilometer persegi dan terdiri atas 34 provinsi dengan potensi ekonomi yang beragam. Oleh karena itu, sejak tahun 2001 Indonesia memberlakukan sistem desentralisasi dan otonomi daerah supaya setiap daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing sehingga pembangunan ekonomi dapat berlangsung lebih optimal.

Gambar 4. 1: Peta Indonesia



Sumber: Portal Informasi Indonesia (2017).

Pada aspek demografi, Indonesia memiliki penduduk sebanyak 271 juta jiwa yang menjadikan Indonesia sebagai negara dalam peringkat ke-4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Lebih lanjut lagi, penduduk tersebut mayoritas terkonsentrasi pada Pulau Jawa sebesar 55,92 persen dan Pulau Sumatera 21,65 persen.

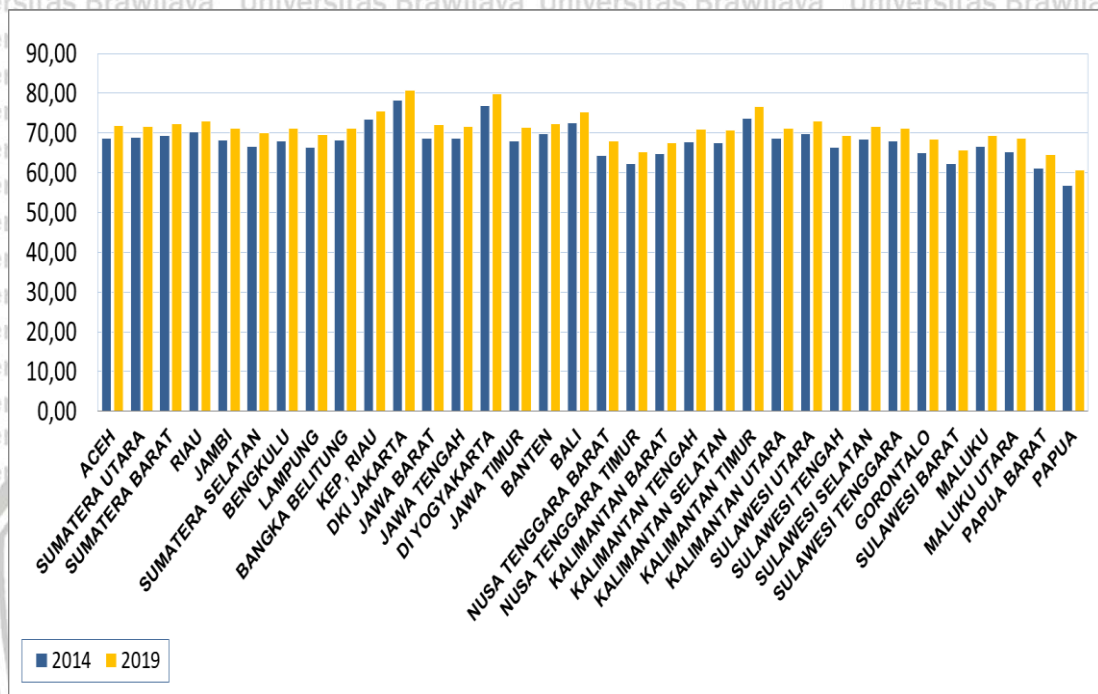
Pada aspek ekonomi, Indonesia termasuk negara dalam jajaran kelompok ekonomi G20 yang artinya perekonomian Indonesia tergolong besar. Pada tahun 2019, PDB Indonesia sebesar Rp15,833 triliun. Hal ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-16 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Meskipun demikian, tingkat perekonomian yang tinggi tersebut tidaklah cukup untuk menggambarkan taraf kesejahteraan penduduk. Taraf kesejahteraan perlu dinilai juga melalui indeks pembangunan manusia.

4.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

4.2.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk menilai derajat keberhasilan pembangunan manusia pada suatu wilayah tertentu. Ketika IPM diimplementasikan maka pembangunan dapat diamati secara lebih komprehensif melalui sisi ekonomi dan sisi sosial masyarakatnya sehingga taraf kesejahteraan masyarakat dapat diperlihatkan dengan lebih akurat sesuai kondisi realitas yang sebenarnya.

Gambar 4. 2: Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2014 dan 2019



Sumber: Data diolah dari BPS, berbagai tahun.

Dalam perkembangannya, pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa nilai IPM pada seluruh provinsi di Indonesia tahun 2014-2019 telah mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Adapun masing-masing daerah memiliki tingkat pertumbuhan IPM yang bervariasi. Pada periode tahun 2018-2019 pertumbuhan IPM tertinggi dialami oleh Provinsi Papua Barat sebesar 1,51 persen, kemudian disusul oleh Provinsi Maluku Utara 1,30 persen, Provinsi Papua 1,30 persen, Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,30 persen, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat 1,25 persen. Sementara, pertumbuhan IPM terendah dialami oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,36 persen, diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta 0,58 persen, dan Provinsi Banten 0,68 persen.

Tabel 4.1 Klasifikasi Kelompok IPM Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2019

Rendah	Sedang
	Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Tengah, Lampung.
Tinggi	Sangat Tinggi
Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Jambi, Bangka, Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Aceh, Jawa Barat, Sumatera Barat, Banten, Sulawesi Utara, Riau, Bali, Kep. Riau, Kalimantan Timur, Di Yogyakarta.	DKI Jakarta

Sumber: Diadaptasi dari BPS (2019).

Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia, IPM diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Tabel 4.1 menyajikan informasi mengenai klasifikasi status IPM pada setiap provinsi di Indonesia tahun 2019. Pada kelompok “sangat tinggi” hanya terdapat satu provinsi, yakni Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pada kelompok “tinggi” terdapat 22 provinsi, sementara pada kelompok “sedang” terdapat 11 provinsi. Lebih lanjut lagi, pada tahun 2019 Provinsi DKI Jakarta memiliki IPM sebesar 80,76 dan diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta sebesar 79,99 poin. Kedua provinsi tersebut merupakan provinsi dengan IPM tertinggi dan jauh meninggalkan provinsi lainnya. Pada sisi

lainnya, Provinsi Papua yang memiliki IPM terendah, yakni sebesar 60,84 poin menjadi semakin tertinggal.

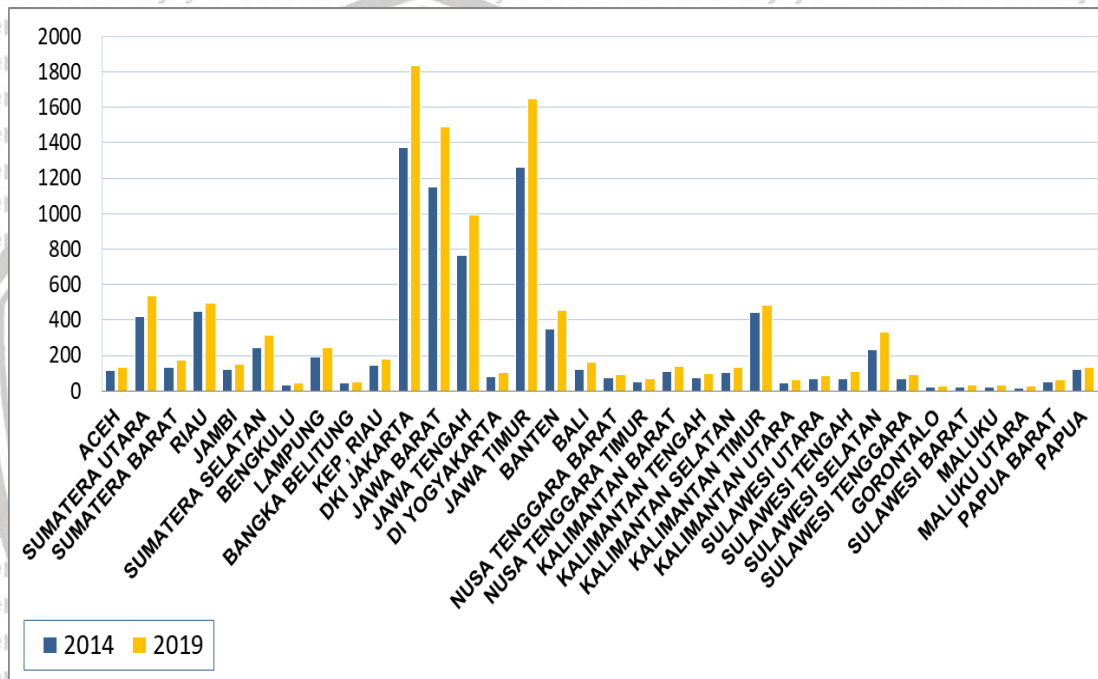
Terjadinya disparitas pencapaian IPM antar provinsi di Indonesia disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi pembangunan daerah yang bersangkutan. Provinsi yang menjadi pusat pemerintahan, aktivitas ekonomi, dan perdagangan memiliki dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai sehingga memperluas akses bagi penduduknya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan. Kondisi demikian akan membuat IPM daerah yang bersangkutan menjadi semakin tinggi seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai komponen umur harapan hidup sebesar 72,79 tahun, harapan lama sekolah sebesar 12,97 tahun, dan rata-rata lama sekolah sebesar 11,06 tahun. Keadaan sebaliknya dialami oleh provinsi yang kurang maju dan memiliki sarana dan prasarana yang terbatas sehingga mempersempit akses bagi penduduknya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai seperti yang terjadi di Provinsi Papua dengan nilai komponen IPM yang secara relatif lebih rendah, yakni umur harapan hidup sebesar 65,65 tahun, harapan lama sekolah sebesar 11,05 tahun, dan rata-rata lama sekolah sebesar 6,65 tahun.

4.2.2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan refleksi dari kinerja perekonomian pada suatu daerah. PDRB bermanfaat untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah, semakin tinggi

nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan sumber daya ekonomi yang tinggi dan berlaku juga hal sebaliknya.

Gambar 4. 3: PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2014 dan 2019 (Dalam Triliun Rupiah)



Sumber: Data diolah dari BPS, berbagai tahun.

Gambar 4.3 menyajikan informasi mengenai perkembangan PDRB menurut provinsi di Indonesia. Melalui grafik tersebut dapat diketahui bahwa PDRB pada seluruh provinsi di Indonesia tahun 2014-2019 telah mengalami peningkatan. Meskipun demikian, dapat dilihat juga bahwa telah terjadi kesenjangan distribusi PDRB di antara provinsi di Indonesia. Selama kurun waktu enam tahun terakhir, rata-rata PDRB tertinggi masih terkonsentrasi pada Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.596,34 triliun, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur senilai Rp1.449,31 triliun, dan

Provinsi Jawa Barat Rp1.314,52 triliun. Sementara daerah yang memiliki rata-rata PDRB terendah, yakni Provinsi Maluku sebesar Rp27,18 triliun, Provinsi Maluku Utara senilai Rp24,43 triliun, dan Provinsi Gorontalo Rp22,66 triliun.

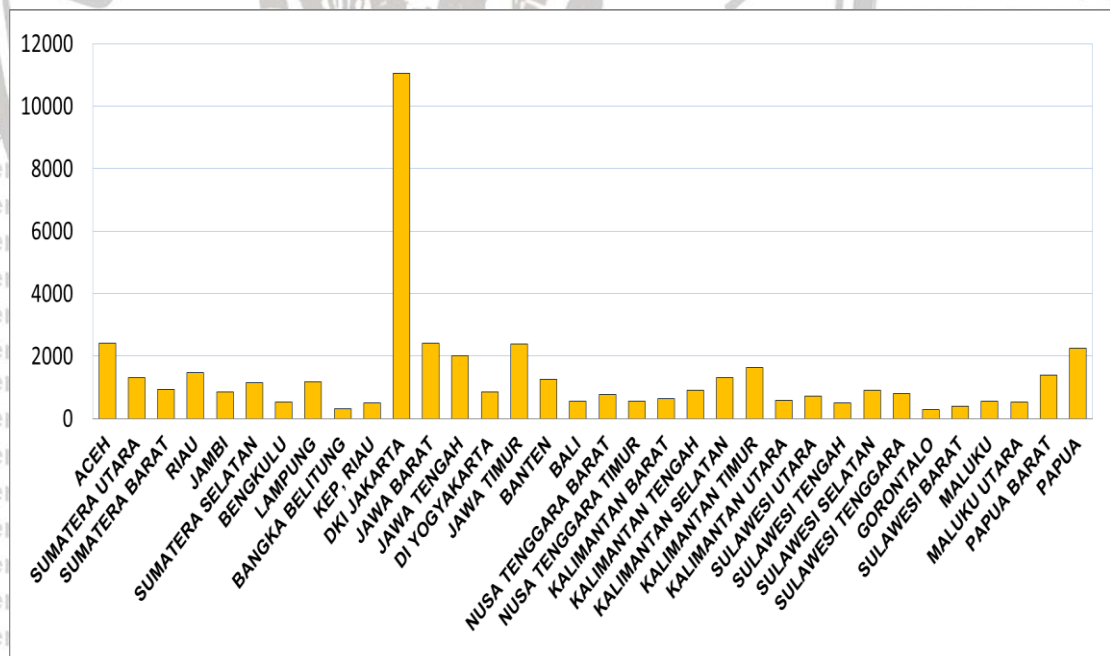
Terjadinya perbedaan besaran PDRB pada setiap provinsi disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, perbedaan struktur perekonomian masing-masing daerah yang bersangkutan. Provinsi dengan PDRB yang tinggi bertumpu pada sektor yang memiliki nilai tambah tinggi seperti industri pengolahan, industri perdagangan besar-eceran serta reparasi mobil-sepeda motor, dan industri konstruksi. Pada tahun 2019 ketiga sektor tersebut mendominasi komposisi PDRB DKI Jakarta sebesar 40,97 persen, Provinsi Jawa Timur 60,12 persen, dan Provinsi Jawa barat 67,09 persen. Sementara itu, provinsi dengan PDRB yang rendah cenderung bergantung pada sektor yang memiliki nilai tambah rendah seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2019, komposisi PDRB Provinsi Gorontalo sebesar 38,93 persen berasal dari sektor-sektor tersebut.

Kedua, perbedaan nilai realisasi penanaman modal. Pada tahun 2019 penanaman modal masih terpusat pada Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini akan menimbulkan kesenjangan PDRB antar provinsi sebab provinsi dengan nilai investasi yang tinggi akan memiliki nilai PDRB yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan tingginya realisasi investasi mampu menciptakan *multiplier effect* yang dapat mengakselerasi aktivitas perekonomian di daerah yang bersangkutan.

4.2.3 Perkembangan Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu jenis pengeluaran pemerintah yang memiliki peran besar terhadap pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan belanja modal dapat dimanfaatkan untuk menyediakan fasilitas publik yang dapat menunjang sasaran-sasaran capaian dimensi pembangunan manusia seperti penyediaan infrastuktur yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 4. 4: Rata-Rata Realisasi Belanja Modal Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2019 (Dalam Milyar Rupiah)



Sumber: Data diolah dari DJPK RI, berbagai tahun.

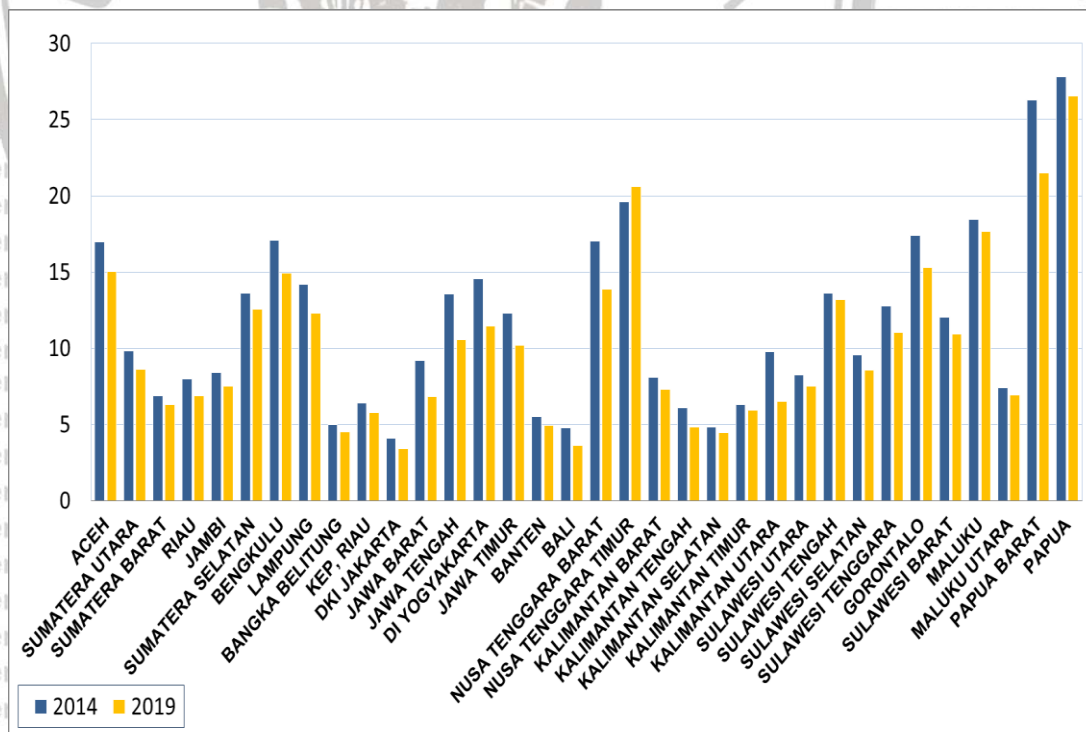
Pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi pengeluaran belanja modal yang dilakukan oleh provinsi-provinsi di Indonesia selama tahun 2014-2019 sangat bervariasi. Rata-rata realisasi belanja modal terbesar dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp11,05 triliun, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat Rp2,41 triliun, dan Provinsi Jawa Timur Rp2,38 triliun. Sementara, rata-rata realisasi belanja modal terkecil berada pada Povinsi Bangka Belitung sebesar Rp315,64 miliar dan Provinsi Gorontalo Rp281,50 miliar. Terjadinya perbedaan jumlah realisasi belanja modal pada masing-masing provinsi di Indonesia disebabkan oleh adanya perbedaan kemampuan fiskal daerah yang bersangkutan, prioritas kebijakan pembangunan, dan kebutuhan masyarakatnya.

Adapun komitmen pemerintah dalam kegiatan pembangunan dapat dilihat melalui nilai rasio realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah. Ketika nilai rasio realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah bernilai tinggi maka pemerintah daerah yang bersangkutan memiliki komitmen yang besar dalam pembangunan ekonomi di wilayahnya dan berlaku juga hal sebaliknya. Selama periode tahun 2014-2019 provinsi yang konsisten memiliki nilai rasio tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 27,95 persen, diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta 27,03 persen, dan Provinsi Sulawesi Barat 25,91 persen. Sementara provinsi yang memiliki nilai rasio terendah, yakni Provinsi Jawa Timur sebesar 9,01 persen dan Jawa Barat 8,79 persen.

4.2.4 Perkembangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kerap menjadi topik utama dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan bersifat multidimensional yang menyangkut berbagai aspek, antara lain aspek sosial, aspek ekonomi, aspek demografi dan aspek lainnya yang saling berkaitan. Jika kemiskinan tidak ditanggulangi maka pelaksanaan program pembangunan manusia akan menjadi terhambat.

Gambar 4. 5: Persentase Kemiskinan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2014 dan 2019 (Dalam Persentase)



Sumber: Data diolah dari BPS, berbagai tahun.

Gambar 4.5 memberikan informasi mengenai tingkat persentase kemiskinan pada masing-masing provinsi di Indonesia. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2014-2019 tingkat persentase kemiskinan telah mengalami penurunan. Pada tahun 2019 persentase kemiskinan terendah berada pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,42 persen, diikuti oleh Provinsi Bali 3,64 persen, dan Provinsi Kalimantan Selatan 4,47 persen. Meskipun demikian, beberapa provinsi masih menghadapi tingkat persentase kemiskinan yang tinggi, terutama pada provinsi di kawasan timur Indonesia, yakni Provinsi Papua sebesar 26,55 persen, diikuti oleh Provinsi Papua Barat 21,51 persen, Nusa Tenggara Timur 20,62 persen. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tingginya kemiskinan di kawasan timur Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, rendahnya aksesibilitas wilayah yang menyebabkan mobilitas penduduk menjadi terbatas, terhambatnya distribusi barang serta jasa, dan minimnya kegiatan perekonomian sehingga taraf kesejahteraan masyarakat menurun. *Kedua*, rendahnya fasilitas pelayanan dasar yang menyebabkan penduduk di wilayah tersebut sulit untuk mengembangkan kualitas hidupnya. *Ketiga*, kualitas sumber daya manusia yang rendah sehingga berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas. *Keempat*, kondisi perekonomian yang masih didominasi oleh sektor primer, utamanya pada sektor pertanian yang masih bersifat subsisten. *Kelima*, faktor kebencanaan yang memperparah kondisi keterpurukan yang diderita oleh penduduk (Bappenas, 2018).

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Pemilihan Model Terbaik

Terdapat tiga kemungkinan model yang dapat digunakan ketika melakukan analisis regresi data panel, yaitu model *common effect*, model *fixed effect*, dan model *random effect*. Pemilihan penggunaan model tersebut ditentukan oleh hasil uji model terbaik, yaitu uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier. Berikut ini merupakan hasil dari serangkaian uji tersebut.

4.3.1.1 Hasil Uji Chow

Uji chow merupakan pengujian tahap awal yang dilakukan dalam uji pemilihan model terbaik. Pada dasarnya, uji ini bertujuan untuk menentukan pilihan di antara model *common effect* dan model *fixed effect*. Dalam melakukan uji ini, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *Common Effect*.

H_1 : Model *Fixed Effect*.

Tabel 4. 2: Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	93.480237	(33,167)	0.0000
Cross-section Chi-square	605.672913	33	0.0000

Sumber: Data diolah dari Eviews 9.

Hasil uji chow pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai Prob. Cross-section F adalah sebesar 0,0000. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nilai Prob. Cross-section F $(0,00) < \alpha (0,05)$ yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* adalah model yang paling sesuai untuk digunakan.

4.3.1.2 Hasil Uji Hausman

Uji hausman merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan pemilihan model terbaik di antara model *fixed effect* dan model *random effect*.

Dalam melakukan uji ini hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *Random Effect*.

H_1 : Model *Fixed Effect*.

Tabel 4. 3: Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.944780	3	0.0001

Sumber: Data diolah dari Eviews 9.

Hasil uji hausman pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai Prob. Cross-section random adalah sebesar 0,0001. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nilai Prob. Cross-section random $(0,0001) < \alpha (0,05)$ yang artinya H_0 ditolak dan H_1

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* merupakan model yang paling sesuai untuk digunakan.

4.3.1.3 Uji Lagrange Multiplier

Dalam penelitian ini uji lagrange multiplier tidak dilaksanakan sebab berdasarkan pada hasil uji chow dan uji hausman sebelumnya telah didapatkan kesimpulan yang sama, yakni model *fixed effect* merupakan model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian.

4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan model *fixed effect* yang diperoleh melalui pendekatan kuadrat terkecil (*ordinary least square*). Oleh karena itu, estimator ini perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu sebelum digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa estimator yang dihasilkan bersifat konsisten dan tidak bias. Berikut ini merupakan hasil dari beberapa uji asumsi klasik yang dilakukan:

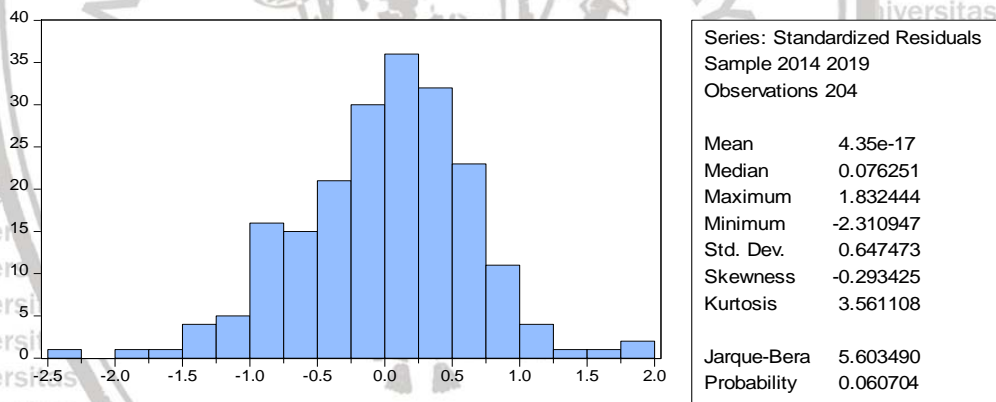
4.3.2.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk memeriksa kondisi residual dalam persamaan regresi. Kondisi dianggap baik ketika regresi yang digunakan memiliki residual yang terdistribusi normal. Pengujian normalitas dapat diperoleh melalui metode uji jarque bera dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Residual terdistribusi normal.

H_1 : Residual tidak terdistribusi normal.

Gambar 4. 6: Hasil Uji Jarque Bera



Sumber: Data diolah dari Eviews 9.

Berdasarkan gambar 4.6 yang memuat hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa Prob. Jarque-Bera sebesar 0.060704. Dengan demikian, nilai Prob. JB (0.060704) > α (0,05) yang artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal.

4.3.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan korelasi yang erat di antara suatu variabel independen dengan variabel independen lainnya. Kondisi dianggap baik ketika tidak ditemukannya korelasi yang tinggi di antara variabel independen yang digunakan, yakni saat nilai koefisien korelasi bernilai kurang dari 0,8.

Tabel 4. 4: Hasil Uji Koefisien Korelasi

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.723475	-0.251689
X2	0.723475	1.000000	-0.042090
X3	-0.251689	-0.042090	1.000000

Sumber: Data diolah dari Eviews 9.

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen memiliki nilai yang lebih rendah dari 0,8. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang erat di antara suatu variabel independen dengan variabel independen lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah multikolinearitas tidak terjadi dalam model ini.

4.3.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk memeriksa kondisi varian residual di antara hasil pengamatan dalam persamaan regresi. Kondisi dianggap baik ketika varian residual bersifat homoskedastis, yakni varian residual memiliki nilai sama pada seluruh pengamatan. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui metode uji glejser. Uji ini dilakukan dengan cara meregresikan seluruh variabel bebas terhadap variabel absolut residual sebagai variabel terikatnya.

Tabel 4. 5: Hasil Uji Glejser

Variabel	Prob
X1	0.5581
X2	0.2012
X3	0.2188

Sumber: Data diolah dari Eviews 9.

Berdasarkan hasil uji glesjer pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa masing-masing variabel independen yang digunakan dalam model memiliki nilai prob. t statistik yang lebih besar dari nilai alpha ($\alpha = 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah heteroskedastititas tidak terjadi dalam model ini.

4.3.3 Hasil Estimasi

Setelah dilakukan serangkaian uji pemilihan model terbaik pada bagian sebelumnya maka keputusan yang didapatkan adalah penelitian ini lebih sesuai dianalisis menggunakan model *fixed effect*. Hasil estimasi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4. 6 Hasil Estimasi Regresi Model *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	71.21776	1.874608	37.99075	0.0000
X1	5.02E-06	1.23E-06	4.082421	0.0001
X2	0.858935	0.206434	4.160824	0.0001
X3	-0.817205	0.077809	-10.50268	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.975782	Mean dependent var	69.48314	
Adjusted R-squared	0.970561	S.D. dependent var	4.160524	
S.E. of regression	0.713857	Akaike info criterion	2.326351	
Sum squared resid	85.10186	Schwarz criterion	2.928167	
Log likelihood	-200.2878	Hannan-Quinn criter.	2.569796	
F-statistic	186.9044	Durbin-Watson stat	0.912246	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah dari Eviews 9.

Tabel 4. 7: Nilai *Unobserved Factor* Setiap *Cross Section unit*

<i>Cross Section unit</i>	<i>Unobserved Factor</i>
Aceh	5.046152
Sumatera Utara	-1.571333
Sumatera Barat	-1.444479
Riau	-1.890693
Jambi	-1.215093
Sumatera Selatan	0.642850
Bengkulu	6.081503
Lampung	0.526394
Bangka Belitung	-2.572858
Kep. Riau	1.821513
DKI Jakarta	-4.488115
Jawa Barat	-7.356976
Jawa Tengah	-1.761464
DI Yogyakarta	1.151204
Jawa Timur	-5.892975
Banten	-3.771938
Bali	0.159092
Nusa Tenggara Barat	1.565783
Nusa Tenggara Timur	3.936224
Kalimantan Barat	-4.715470
Kalimantan Tengah	-3.627705
Kalimantan Selatan	-4.914122
Kalimantan Timur	0.170482
Kalimantan Utara	-1.308139
Sulawesi Utara	0.713736
Sulawesi Tengah	2.171209
Sulawesi Selatan	-0.820677
Sulawesi Tenggara	2.304422



Cross Section unit	Unobserved Factor
Gorontalo	4.398136
Sulawesi Barat	-3.154938
Maluku	6.310801
Maluku Utara	-4.364346
Papua Barat	4.719676
Papua	2.791304

Sumber: Data diolah dari Eviews 9.

Tabel 4.6 memuat hasil analisis regresi data panel menggunakan model *fixed effect*. Berdasarkan persamaan regresi tersebut maka struktur model penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = 71.21776_{it} + 5.02 X1_{it} + 0.858935 X2_{it} + -0.817205 X3_{it} + e_{it}$$

Persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai *unobserved factor*

Berdasarkan tabel 4.7 yang memuat nilai *unobserved factor* dari setiap provinsi (*cross section unit*) maka dapat diketahui bahwa provinsi dengan nilai *unobserved factor* tertinggi adalah Provinsi Maluku sebesar 6.310801, artinya Provinsi Maluku memiliki nilai indeks pembangunan manusia 6.310801 lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Kemudian, provinsi dengan nilai *unobserved factor* terendah adalah Provinsi Jawa Barat sebesar -7.356976, artinya Provinsi Jawa

Barat memiliki nilai indeks pembangunan manusia -7.356976 lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya, *ceteris paribus*.

2. Variabel PDRB (X1)

Berdasarkan hasil persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel PDRB bernilai sebesar 5.02 artinya jika nilai PDRB mengalami peningkatan sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia pada 34 provinsi di Indonesia sebesar 5.02 , *ceteris paribus*.

3. Variabel Belanja Modal (X2)

Berdasarkan hasil persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel belanja modal bernilai sebesar 0.858935 , artinya jika nilai belanja modal mengalami peningkatan sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia pada 34 provinsi di Indonesia sebesar 0.858935 , *ceteris paribus*.

4. Variabel Kemiskinan (X3)

Berdasarkan hasil persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel kemiskinan bernilai sebesar -0.817205 , artinya jika tingkat kemiskinan mengalami peningkatan sebesar satu-satuan maka akan menurunkan indeks pembangunan manusia pada 34 provinsi di Indonesia sebesar -0.817205 , *ceteris paribus*.

4.3.4 Hasil Uji Statistik

4.3.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan dari seluruh variabel bebas yang digunakan dalam menerangkan variabel terikatnya. Apabila nilai Adjusted R^2 mendekati satu maka artinya seluruh variabel bebas yang digunakan memiliki kemampuan yang semakin baik dalam menjelaskan variabel terikatnya.

Tabel 4. 8: Ringkasan Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.975782
Adjusted R-squared	0.970561

Sumber: Data diolah dari Eviews 9.

Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa persamaan regresi yang digunakan memiliki nilai koefisien *Adjusted R²* sebesar 0.970561 yang artinya adalah variabel indeks pembangunan manusia dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, variabel belanja modal dan variabel kemiskinan sebesar 97,05 persen. Sementara sisanya 2,95 persen dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model persamaan regresi.

4.3.4.2 Hasil Uji Statistik Simultan (Uji Statistik F)

Uji F statistik merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh simultan dari seluruh variabel bebas yang digunakan dalam model terhadap variabel terikatnya. Dalam pengujiannya, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H_0: \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$$

$$H_1: \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$$

Tabel 4. 9: Ringkasan Hasil Uji Statistik F

Prob(F-statistic)	0.000000
-------------------	----------

Sumber: Data diolah dari Eviews 9.

Hasil uji F statistik pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa Prob. F-statistik memiliki nilai 0,00. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nilai Prob. F (0,00) < α (0,05) yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

4.3.4.3 Hasil Uji Statistik Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh parsial dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Hasil pengujian yang didapatkan adalah sebagai berikut:



Tabel 4. 10: Ringkasan Hasil Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	71.21776	1.874608	37.99075	0.0000
X1	5.02E-06	1.23E-06	4.082421	0.0001
X2	0.858935	0.206434	4.160824	0.0001
X3	-0.817205	0.077809	-10.50268	0.0000

Sumber: Data diolah dari Eviews 9.

Berdasarkan ringkasan hasil uji statistik parsial tabel 4.10, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel PDRB (X1) memiliki koefisien bertanda positif dan memiliki nilai Prob. t (0.0001) < α (0,05), artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
2. Variabel belanja modal (X2) memiliki koefisien bertanda positif dan memiliki nilai Prob. t (0.0001) < α (0,05), artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
3. Variabel kemiskinan (X3) memiliki koefisien bertanda negatif dan memiliki nilai Prob. t (0.0000) < α (0,05), artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap IPM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

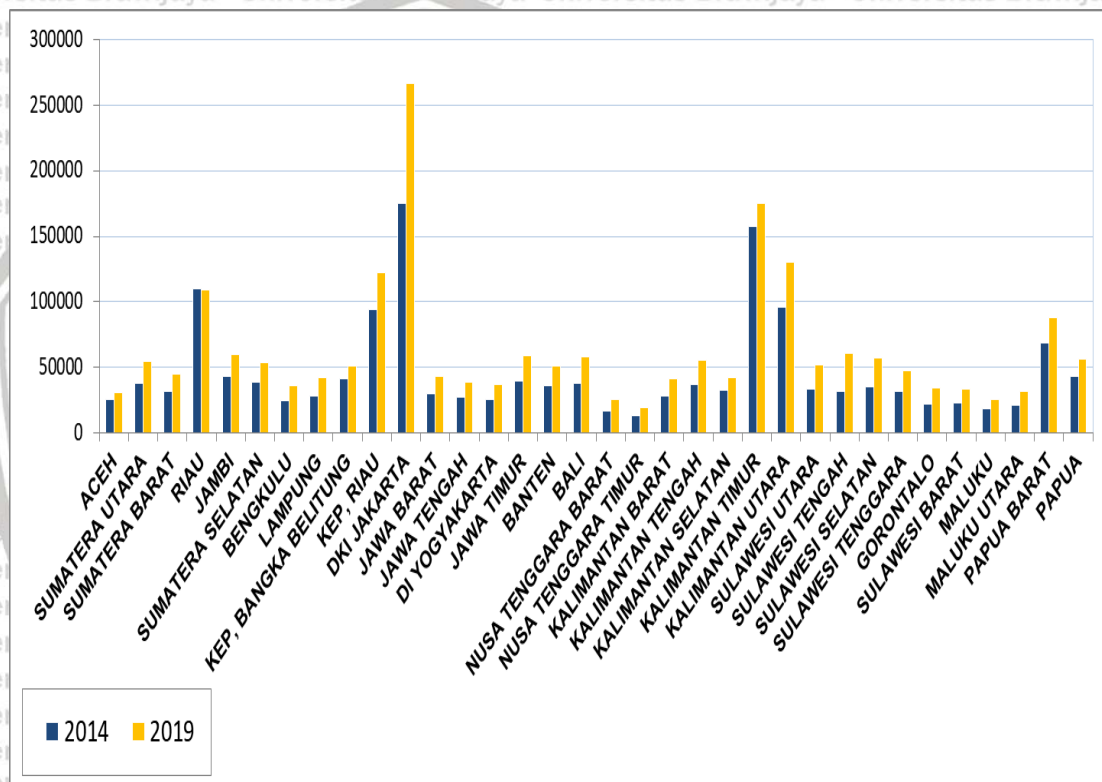
Secara konseptual, meningkatnya PDRB merupakan indikasi bahwa perekonomian daerah yang bersangkutan sedang mengalami ekspansi. Ekspansi dalam perekonomian tersebut akan menambah persediaan sumber daya ekonomi yang diperlukan dalam pembangunan manusia, terutama dalam bentuk penciptaan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap pengangguran dan meningkatkan produktivitas yang dapat menambah total output produksi sehingga pendapatan perkapita mengalami kenaikan. Ketika pendapatan perkapita meningkat maka penduduk memiliki pilihan-pilihan yang lebih luas dalam mencapai standar hidup layak sehingga kualitas pembangunan manusia akan menjadi semakin tinggi.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh UNDP (2010) bahwa kondisi perekonomian juga turut menentukan keberhasilan pembangunan manusia.

Perkembangan perekonomian mampu meningkatkan kemakmuran penduduk melalui kenaikan pendapatan perkapita, akan tetapi kondisi tersebut perlu disertai juga oleh perbaikan pemerataan pendapatan supaya harapannya seluruh lapisan penduduk mampu merasakan manfaat dari kenaikan pendapatan perkapita yang terjadi. Adapun di Indonesia pada tahun 2014-2019 pendapatan perkapita penduduk

terus mengalami peningkatan dan diikuti juga oleh angka koefisien gini yang secara konsisten mengalami penurunan.

Gambar 4. 7: Perkembangan PDRB Perkapita Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2014 dan 2019 (Dalam Ribu Rupiah)

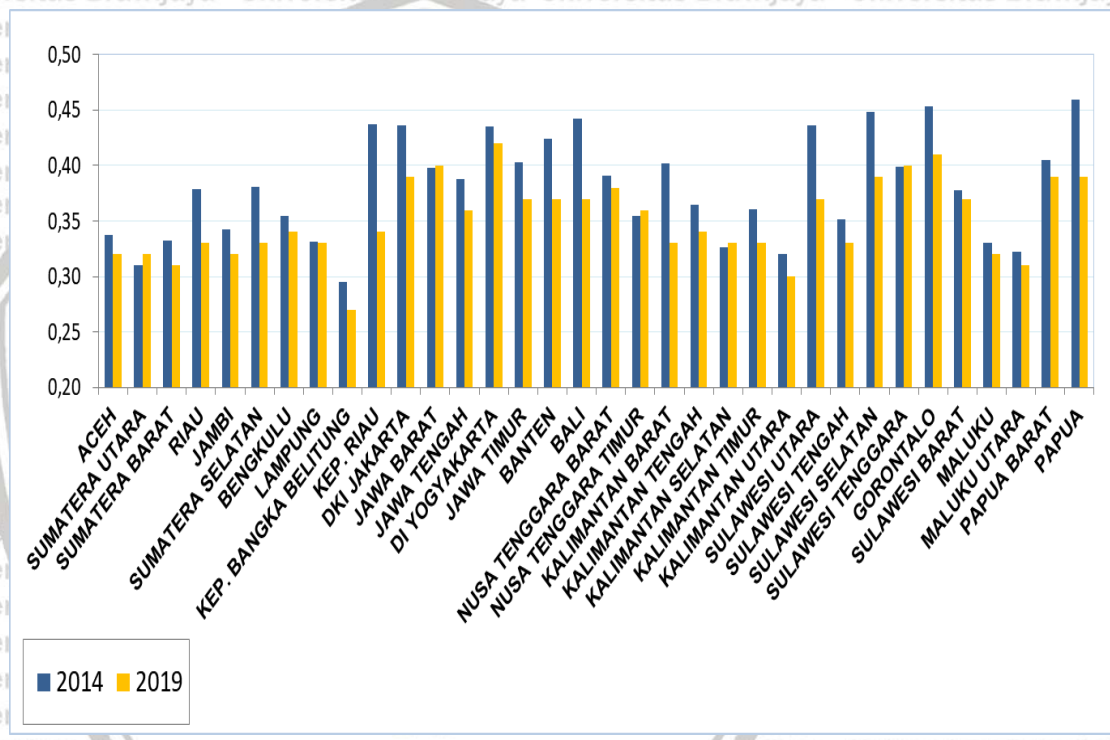


Sumber: Data diolah dari BPS, berbagai tahun.

PDRB perkapita merupakan cerminan dari tingkat pendapatan masyarakat. Melalui gambar 4.7 dapat dilihat bahwa pendapatan masyarakat pada seluruh provinsi di Indonesia mengalami tren peningkatan. Secara nasional, pada tahun 2014 sebesar Rp31.376.037,00 dan mencapai Rp42.780.957,00 pada tahun 2019.

Dengan kata lain, pendapatan masyarakat telah meningkat sebesar 36,34 persen dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

Gambar 4. 8: Perkembangan Koefisien Gini Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2014 dan 2019



Sumber: Data diolah dari BPS, berbagai tahun.

Gambar 4.8 menunjukkan perkembangan koefisien gini indonesia tahun 2014-2019. Berdasarkan grafik tersebut dapat terlihat jelas bahwa kesenjangan distribusi pendapatan pada provinsi-provinsi di Indonesia mengalami penurunan, dimana secara nasional pada tahun 2014 sebesar 0,414 dan menjadi sebesar 0,381 pada tahun 2019. Adapun sejak tahun 2019 kesenjangan pendapatan secara umum

telah berada dibawah 0,4 yang artinya tingkat kesenjangan pendapatan dapat dikategorikan rendah.

Implikasi dari meningkatnya pendapatan perkapita dan perbaikan pemerataan pendapatan adalah daya beli seluruh lapisan penduduk menjadi lebih tinggi sehingga komponen IPM, yakni pengeluaran perkapita disesuaikan juga turut mengalami peningkatan. Lebih lanjut lagi, peningkatan pendapatan penduduk juga akan mempengaruhi komponen IPM yang lainnya. Hal ini dapat dipahami melalui teori hukum engle (*engle's law*) yang menyatakan bahwa sampai pada taraf tertentu peningkatan pendapatan penduduk akan mengubah pola perilaku konsumsinya, dimana akan terjadi penurunan persentase pengeluaran konsumsi makanan dan meningkatnya persentase konsumsi non-makanan. Dengan kata lain, meningkatnya pendapatan akan memperbesar alokasi pengeluaran rumah tangga untuk keperluan hidup lainnya yang dapat mendukung perbaikan kualitas pembangunan manusia seperti pemenuhan kebutuhan nutrisi yang mencukupi, pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi, dan layanan kesehatan yang berkualitas. Kondisi ini pada akhirnya akan meningkatkan komponen penyusun IPM, yakni bertambahnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan lama harapan hidup.

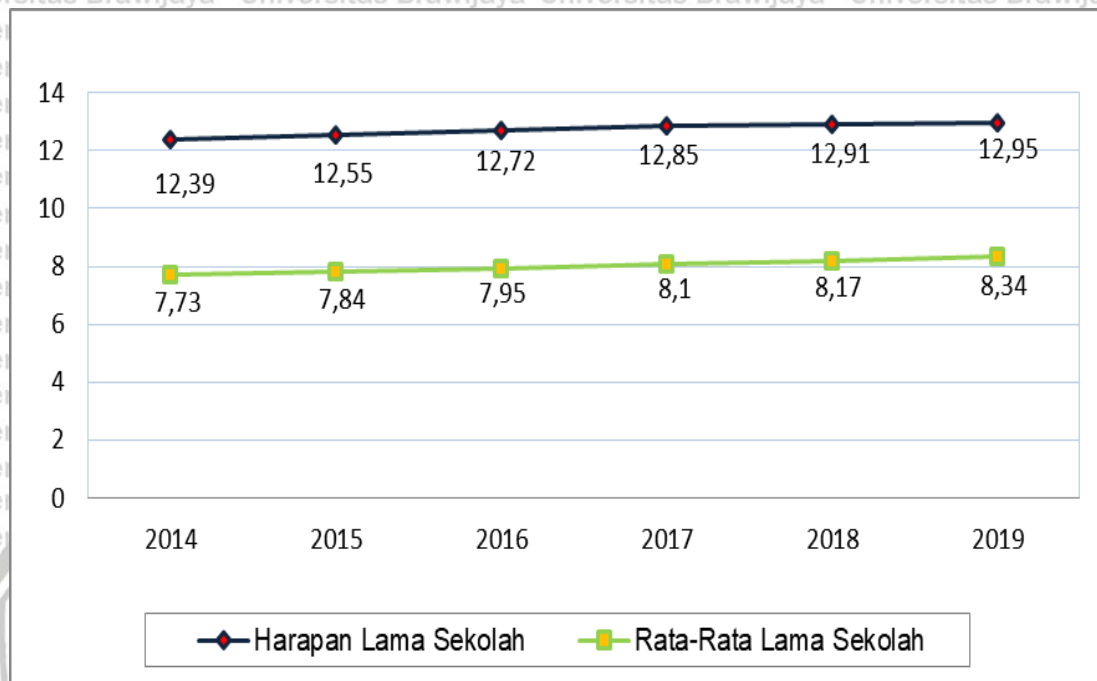
Temuan dalam penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian yang telah dilakukan Baeti (2013), Bhakti, dkk (2012), dan Muliza, dkk (2017) yang menemukan bahwa PDRB memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini dikarenakan kenaikan PDRB akan meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan pendapatan perkapita. Terjadinya peningkatan pendapatan perkapita tersebut pada akhirnya akan direspon oleh perubahan jenis barang yang konsumsi

oleh penduduk, dimana konsumsi rumah tangga akan menjadi lebih berorientasi terhadap konsumsi yang mendukung pembangunan manusia seperti meningkatnya konsumsi makanan dengan kalori yang mencukupi, penggunaan sanitasi yang lebih baik, dan meningkatkan alokasi pengeluaran untuk melanjutkan pendidikan.

4.4.2 Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap IPM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang ditimbulkan dari kenaikan realisasi belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia. Secara teoritis, belanja modal merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam memperbaiki kualitas pembangunan manusianya. Hal ini dikarenakan belanja modal dapat dimanfaatkan untuk menyediakan fasilitas publik pada bidang-bidang tertentu yang berkaitan langsung dengan capaian-capaian dari dimensi pembangunan manusia.

Mekanisme pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan belanja modal terhadap pembangunan manusia dapat dijelaskan melalui tiga saluran. *Pertama*, melalui saluran bidang pendidikan. Pendidikan merupakan modal berharga untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai maka penduduk akan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk dapat mengenyam pendidikan dan memiliki harapan sekolah sampai pada jenjang yang lebih tinggi sehingga komponen IPM, yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) akan mengalami peningkatan.

Gambar 4. 9: Perkembangan HLS dan RLS di Indonesia Tahun 2014-2019

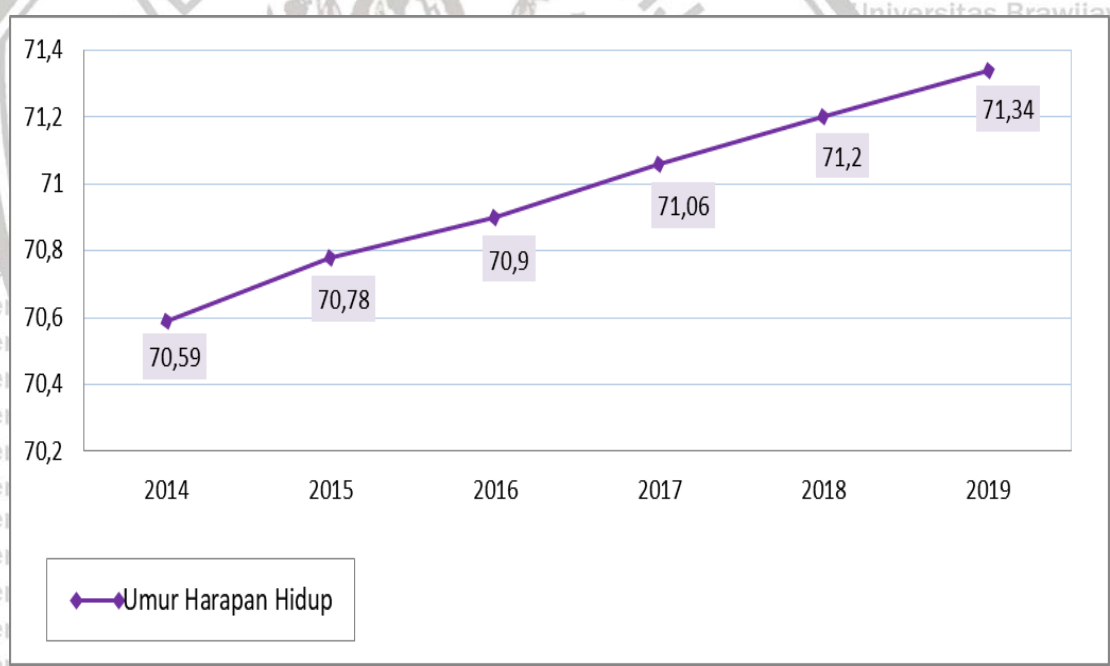
Sumber: Data diolah dari BPS, berbagai tahun.

Berdasarkan gambar 4.9 dapat diketahui bahwa HLS dan RLS di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari adanya peningkatan jumlah fasilitas pendidikan yang merupakan salah satu bentuk output dari belanja modal. Seperti diketahui bahwa pada tahun 2014 jumlah sekolah negeri di Indonesia pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah sebanyak 164.300 unit dan menjadi 165.973 unit pada tahun 2019 (BPS, 2019).

Ketika jumlah fasilitas pendidikan meningkat maka setiap penduduk memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan taraf pendidikannya sehingga kualitas hidupnya akan semakin membaik.

Kedua, melalui saluran bidang kesehatan. Kesehatan merupakan faktor krusial yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan manusia. Dengan tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai maka penduduk memiliki akses yang lebih luas untuk menjangkau layanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan mereka sehingga komponen IPM, yakni Umur Harapan Hidup (UHH) akan mengalami peningkatan.

Gambar 4. 10: Perkembangan Umur Harapan Hidup Indonesia pada Periode Tahun 2014-2019 (dalam tahun)



Sumber: Data diolah dari BPS, berbagai tahun.

Berdasarkan gambar 4.10 dapat diketahui bahwa UHH penduduk Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan realisasi belanja modal telah digunakan untuk menambah jumlah fasilitas layanan kesehatan bagi

penduduk. Sebagaimana diketahui pada periode tahun 2014-2019 telah terjadi peningkatan jumlah puskesmas di Indonesia sebanyak 403 unit dan terdapat penambahan rumah sakit pemerintah sebanyak 135 unit (Kemenkes, 2019).

Pemenuhan jumlah fasilitas kesehatan yang mencukupi kebutuhan penduduk pada akhirnya akan mendorong perkembangan kualitas pembangunan manusia dari sisi kesehatan.

Ketiga, melalui saluran bidang ekonomi. Adanya pembangunan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi seperti jalan raya, jaringan listrik, transportasi, dan infrastruktur ekonomi lainnya akan meningkatkan arus laju informasi, barang, dan jasa antar wilayah sehingga perekonomian dapat berkembang pesat dan taraf kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesoebroto (1993) bahwa pengeluaran pemerintah berupa pembentukan modal tetap (belanja modal) merupakan fundamental utama dalam proses pembangunan ekonomi. Dalam teori ini, belanja modal dimanfaatkan untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai maka suatu daerah cenderung memiliki kemampuan ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Sari dan Supadmi (2016) bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Terjadinya kenaikan realisasi belanja modal akan menambah

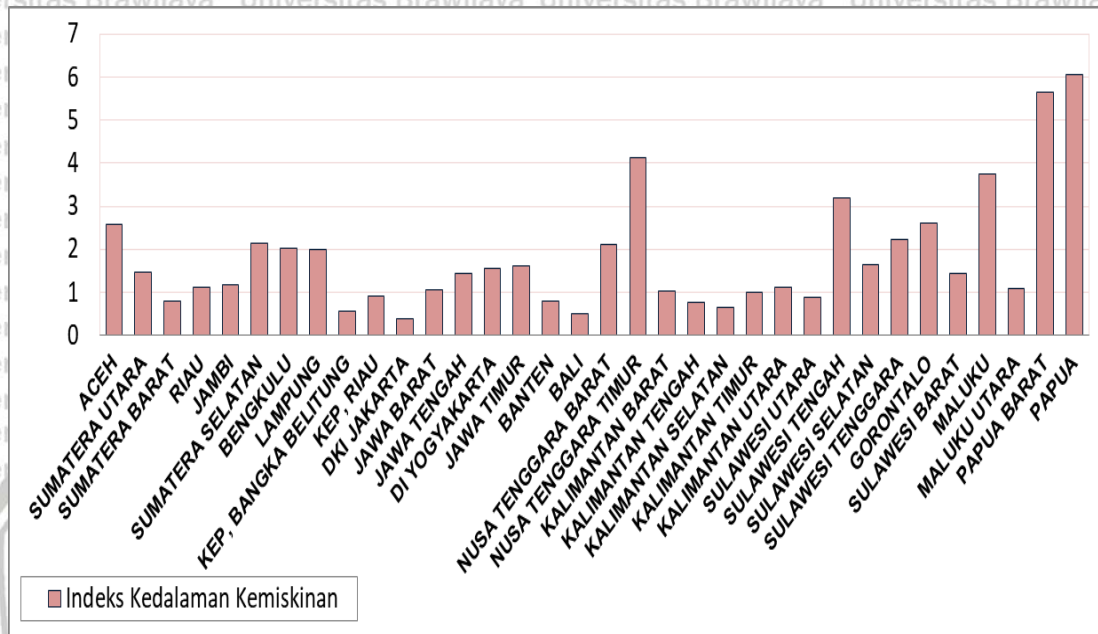
kemampuan pemerintah dalam menyediakan barang publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, baik pada aspek pendidikan, aspek kesehatan maupun aspek ekonomi. Ketika ketiga aspek tersebut terpenuhi maka pembangunan manusia akan mengalami peningkatan.

4.4.3 Analisis Pengaruh Kemiskinan terhadap IPM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat persentase kemiskinan memberikan pengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Secara konseptual, permasalahan kemiskinan akan menurunkan kualitas hidup penduduk. Ketika penduduk menderita kemiskinan maka mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mendasarnya seperti mendapatkan layanan kesehatan, memperoleh pendidikan, dan memenuhi kebutuhan gizi yang mencukupi sehingga menyebabkan penduduk miskin sulit untuk menggapai capaian-capaian dari indeks pembangunan manusia.

Deprivasi kesejahteraan yang diakibatkan oleh permasalahan kemiskinan juga akan menyebabkan penduduk miskin menjadi semakin sulit untuk melangsungkan hidupnya dan bangkit dari keterpurukan yang diderita. Hal ini dapat dilihat melalui tingginya angka indeks kedalaman kemiskinan yang masih dialami oleh provinsi-provinsi di Indonesia.

Gambar 4. 11: Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2019



Sumber: Data diolah dari BPS (2019).

Gambar 4.11 menyajikan indeks kedalaman kemiskinan menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Dapat dilihat bahwa kedalaman kemiskinan pada beberapa provinsi di Indonesia masih tergolong tinggi, yakni Provinsi Papua sebesar 6,07, Provinsi Papua Barat 5,64, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur 4,13. Keadaan tersebut menyebabkan pembangunan manusia di Indonesia menjadi terhambat. Hal ini dikarenakan semakin tinggi angka indeks kedalaman kemiskinan, maka menunjukkan bahwa semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan sehingga penduduk miskin semakin sulit untuk dapat mencapai standar hidup yang layak.

Hubungan antara permasalahan kemiskinan dan rendahnya kualitas hidup penduduk telah dikemukakan Bank Dunia (2000) bahwa kemiskinan adalah hilangnya kesejahteraan seseorang (*deprivation in well-being*) yang ditandai oleh beberapa karakteristik. *Pertama*, rendahnya pendapatan dan aset yang dimiliki sehingga kebutuhan mendasarnya seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan tidak dapat terpenuhi. *Kedua*, kondisi ketidakberdayaan yang memutus akses mereka terhadap sumber daya yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup. *Ketiga*, kondisi kerentanan yang menyebabkan mereka kesulitan dalam menghadapi keadaan yang bersifat darurat seperti bencana alam dan penyakit kronis. Implikasi yang ditimbulkan dari ketiga hal tersebut adalah kualitas hidup seseorang akan menurun sehingga pembangunan manusia menjadi terhambat.

Secara lebih spesifik, keterkaitan antara kemiskinan dan pembangunan manusia dikemukakan oleh Sen (1999) bahwa kemiskinan adalah hilangnya kapabilitas seseorang yang dicirikan terjadinya gizi buruk, buta huruf, dan kelemahan fisik. Ketika seseorang memiliki kapabilitas yang rendah maka mereka tidak mampu mencapai indikator-indikator dari pembangunan manusia, yakni indikator pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran perkapita disesuaikan. Dampaknya adalah indeks pembangunan manusia akan mengalami penurunan.

Suradi (2007) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa kemiskinan dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembangunan manusia. Seperti yang telah diketahui bahwa pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang mengungus partisipasi aktif penduduk dalam kegiatan pembangunan. Tujuan

tersebut tidak akan terwujud ketika angka kemiskinan masih tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk miskin memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk mengembangkan potensi dirinya seperti menempuh pendidikan dan melatih keterampilan. Jangankan untuk mengembangkan potensi dirinya, untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup mendasarnya saja mereka mengalami kesulitan.

Temuan dalam penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian Muliza, dkk (2017) bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan yang ditimbulkan dari kemiskinan terhadap IPM. Permasalahan kemiskinan akan membatasi seseorang dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai hidup layak, dimana individu miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang memadai untuk mencapai standar hidup layak sehingga akan menekan indeks pembangunan manusia.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) direspon oleh peningkatan indeks pembangunan manusia. Hal demikian terjadi karena meningkatnya PDRB mampu menambah sumber daya ekonomi yang diperlukan dalam pembangunan manusia, utamanya dalam bentuk peningkatan pendapatan perkapita. Ketika pendapatan perkapita mengalami kenaikan maka penduduk memiliki pilihan-pilihan yang lebih luas untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya sehingga pembangunan manusia dapat berlangsung lebih optimal.
2. Belanja modal direspon oleh peningkatan indeks pembangunan manusia. Hal demikian terjadi karena belanja modal dimanfaatkan untuk menyediakan fasilitas publik yang menyangkut capaian-capaian dari dimensi pembangunan manusia seperti penyediaan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi sehingga pembangunan manusia dapat

berjalan secara berkesinambungan melalui peningkatan kualitas manusianya dan diikuti juga oleh penguatan kemampuan ekonomi masyarakatnya.

3. Kemiskinan direpson oleh penurunan indeks pembangunan manusia. Hal demikian terjadi karena kemiskinan memiliki asosiasi yang erat dengan rendahnya taraf kesejahteraan seseorang yang dicirikan dengan keadaan serba kekurangan, kelemahan fisik, dan ketidakberdayaan. Ketika penduduk mengalami kemiskinan maka sulit bagi mereka untuk menggapai capaian-capaian dari dimensi indeks pembangunan manusia.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan maka terdapat beberapa hal yang disarankan oleh penulis, yaitu:

1. Pemerintah provinsi diharapkan dapat mempertahankan peningkatan produk domestik regional bruto daerahnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui beberapa program. *Pertama*, pemetaan potensi ekonomi daerah supaya sektor-sektor unggulan daerah dapat diketahui sehingga pembangunan ekonomi dapat berlangsung lebih optimal. *Kedua*, perencanaan kawasan ekonomi wilayah supaya tercipta aglomerasi industri yang dapat meningkatkan efisiensi, penyerapan tenaga kerja, dan transfer pengetahuan. *Ketiga*, meningkatkan realisasi penanaman modal supaya terjadi efek pengganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian yang dapat mengakselerasi perkembangan ekonomi.

Dengan demikian maka perekonomian dapat terus mengalami perkembangan sehingga penduduk juga akan memiliki kesempatan yang lebih luas dalam memperoleh penghidupan yang layak.

2. Pemerintah provinsi perlu mempertahankan besaran realisasi pengeluaran belanja modal dan melakukan pengawasan terhadap penyerapan anggaran belanja modal di daerahnya supaya tepat sasaran pada bidang-bidang yang memiliki capaian (*outcome*) yang tinggi terhadap peningkatan pembangunan manusia, antara lain seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada bidang pendidikan, pemerintah perlu menambah pembangunan sekolah negeri, ketersediaan ruang kelas, dan sarana penunjang pendidikan lainnya sehingga memperluas kesempatan penduduk untuk meningkatkan taraf pendidikannya. Pada bidang kesehatan, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan rumah sakit umum daerah dan puskesmas pada wilayah-wilayah terpencil sehingga meningkatkan keterjangkauan penduduk terhadap pelayanan medis yang memadai. Pada bidang ekonomi, pemerintah perlu membangun infrastruktur transportasi yang dapat meperlancar arus laju logistik sehingga meningkatkan konektivitas kegiatan ekonomi antarwilayah.

3. Pemerintah provinsi diharapkan dapat mengentaskan permasalahan kemiskinan di daerahnya. Kondisi demikian dapat diwujudkan melalui beberapa program. *Pertama*, optimalisasi program keluarga harapan sehingga lebih banyak penduduk miskin yang dapat memperoleh akses terhadap pelayanan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. *Kedua*, bantuan pangan nontunai sehingga penduduk miskin mampu memperoleh

kebutuhan pangan pokok untuk memenuhi konsumsi pangan minimumnya.

Ketiga, bantuan siswa miskin sehingga penduduk miskin memperoleh bantuan

tunai dalam rangka memenuhi kebutuhan penunjang pendidikannya seperti

buku, alat tulis, dan konsumsi gizi yang mencukupi. Dengan demikian,

harapannya penduduk miskin dapat memperoleh perlindungan sosial baik dari

sisi pendidikan, kesehatan, dan pangan sehingga taraf kualitas pembangunan

manusia dapat mengalami perbaikan.



DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIM YKPN.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. *Analisis Wilayah Dengan Kemiskinan Tinggi*. <https://www.bappenas.go.id/publikasi> diakses pada 5 februari 2021.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Indonesia 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2019. *Indeks Pembangunan Manusia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2019. *Potret Pendidikan Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2020. *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, 2014-2019*. <https://www.bps.go.id/indicator> diakses pada 8 juli 2020.

Badan Pusat Statistik. 2020. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Provinsi, 2014-2019*. <https://www.bps.go.id/indicator> diakses pada 8 juli 2020.

Badan Pusat Statistik. 2020. *Persentase Kemiskinan Menurut Provinsi, 2014-2019*. <https://www.bps.go.id/indicator> diakses pada 8 juli 2020.

Baeti, Nur. 2013. Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, Vol.2 (No.3): 85–98.

Bhakti, Nadia Ayu., Istiqomah., & Suprpto. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.18 (No.4): 52–69.

Chambers, Robert. 1983. *Rural Development: Putting the Last First*. New York: Pearson Education Limited.

Gujarati, Damodar.N., & Porter, Dawn.C. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 2*, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Jhingan, M.L. 2016. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Edisi Kesebelas. Jakarta: Raja Grafindo.

Kementerian Kesehatan. 2019. *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2019. *Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2014-2019*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> diakses pada 8 juli 2020.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019*. <https://kemendagri.go.id/arsip> diakses pada 15 november 2020.

Khusaini, Mohammad. 2007. Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Anggaran Daerah: Studi di Jawa Timur. *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol.1 (No.1): 18–35.

Kuncoro, Mudradjat. 2010. *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik*. Jakarta: Erlangga.

Lumbantoruan, Eka Pratiwi., & Hidayat, Paidi. 2014. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi-Provinsi di Indonesia (Metode Kointegrasi). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.2 (No.2): 14–27.

Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Mankiw, N. G. 2006. *Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Maulana, Ridwan., & Bowo, Prasetyo Ari. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Teknologi terhadap IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2011. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, Vol.6 (No.2): 163–69.

Muda, Iskandar., Helmi, Syafrizal., & Kholis, Azizul. 2014. Kajian Pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Pertumbuhan Ekonomi, dan Alokasi Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol.1 (No.1): 12–29.

Muliza, Teuku Zulham., & Seftarita, Chenny. 2017. Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan, dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.3 (No.1): 51–69.

Musgrave, Richard. A., & Musgrave, Peggy.B. 1989. *Public Finance In Theory and Practice*. New York: McGraw Hill.

Mustafa, Ghulam., Rizov, Marian., & Kernohan, David. 2017. Growth, Human Development, and Trade: The Asian Experience. *Journal Economic Modeling*, Vol.1 (No.4): 93–101.

Nina, G.A., & Rustariyuni, S.D. 2018. Pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran Nonmakanan, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, Vol.18 (No.2): 121–41.

Omodero, Cordelia Onyinyechi. 2019. Government General Spending and Human Development: A Case Study of Nigeria. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol.8 (No.1): 51–59.

Portal Informasi Indonesia. 2017. *Peta Indonesia*. <https://indonesia.go.id/peta-indonesia> diakses pada 1 maret 2021.

Pudjiyanto, Bambang., & Syawie, Muhammad. 2015. "Kemiskinan dan Pembangunan Manusia. *Jurnal Sosio Informa*, Vol.1 (No.3): 31–46.

Rakhmadani, Muhammad. 2018. "Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Kesenjangan Antar Daerah dan Pembiayaan Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016". *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 2 (No. 2): 309-319.

Ranis, Gustav. 2004. *Human Development and Economic Growth*. New Haven.

Sari, I.A.C.Y., & Supadmi, N.L. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *E--Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.15 (No.3): 2409–2438.

Sen, Amartya Kumar. 1999. *Development As Freedom*. New York: Alfred A. Knopf Inc.

Setiawan, Muhammad., & Hakim, Abdul. 2013. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Economia*. Vol. 9 (No. 1): 19-26.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2006. *Teori Pengantar Makroekonomi*. Edisi ketiga. Jakarta: Raja Grafindo.

Suradi. 2007. Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Kesejahteraan Sosial (Kajian Tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol.12 (No.3): 1–11.

Suyanto, Bagong. 2001. Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol.1 (No.4): 25–42.

Todaro, M.P., & Smith, S.C. 2014. *Pembangunan Ekonomi Buku 1*. Edisi Kesebelas. Jakarta: Erlangga.

United Nation Development Program. 1990. *Human Development Report 1990*. New York: Oxford University Press.

United Nation Development Program. 1995. *Human Development Report 1995*. New York: Oxford University Press.

United Nation Development Program. 2010. *Human Development Report 2010*. New York: Palgrave Macmillan.

Widarjono, Agus. 2005. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

World Bank. 2000. *World Development Report : Attacking Poverty*. New York: Oxford University Press.

Yuliani, Tutik., & Saragih, Novita. 2014. Determinan Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, Vol.7 (No.1): 60–72.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: EQ01

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	93.480237	(33,167)	0.0000
Cross-section Chi-square	605.672913	33	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 01/11/21 Time: 11:16

Sample: 2014 2019

Periods included: 6

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 204

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66.10713	2.494872	26.49720	0.0000
X1	8.58E-07	7.58E-07	1.132561	0.2588
X2	1.195596	0.393245	3.040336	0.0027
X3	-0.455723	0.036606	-12.44938	0.0000

R-squared	0.528414	Mean dependent var	69.48314
Adjusted R-squared	0.521340	S.D. dependent var	4.160524
S.E. of regression	2.878468	Akaike info criterion	4.971806
Sum squared resid	1657.116	Schwarz criterion	5.036868
Log likelihood	-503.1243	Hannan-Quinn criter.	4.998125
F-statistic	74.70032	Durbin-Watson stat	0.044890
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 2: Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: EQ01

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.944780	3	0.0001

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.000005	0.000003	0.000000	0.0413
X2	0.858935	0.997213	0.002871	0.0099
X3	-0.817205	-0.677814	0.002674	0.0070

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 01/11/21 Time: 11:18

Sample: 2014 2019

Periods included: 6

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 204

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	71.21776	1.874608	37.99075	0.0000
X1	5.02E-06	1.23E-06	4.082421	0.0001
X2	0.858935	0.206434	4.160824	0.0001
X3	-0.817205	0.077809	-10.50268	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.975782	Mean dependent var	69.48314
Adjusted R-squared	0.970561	S.D. dependent var	4.160524
S.E. of regression	0.713857	Akaike info criterion	2.326351
Sum squared resid	85.10186	Schwarz criterion	2.928167
Log likelihood	-200.2878	Hannan-Quinn criter.	2.569796
F-statistic	186.9044	Durbin-Watson stat	0.912246
Prob(F-statistic)	0.000000		



Lampiran 3: Hasil Estimasi Model *Fixed Effect*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/11/21 Time: 11:19
 Sample: 2014 2019
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 204

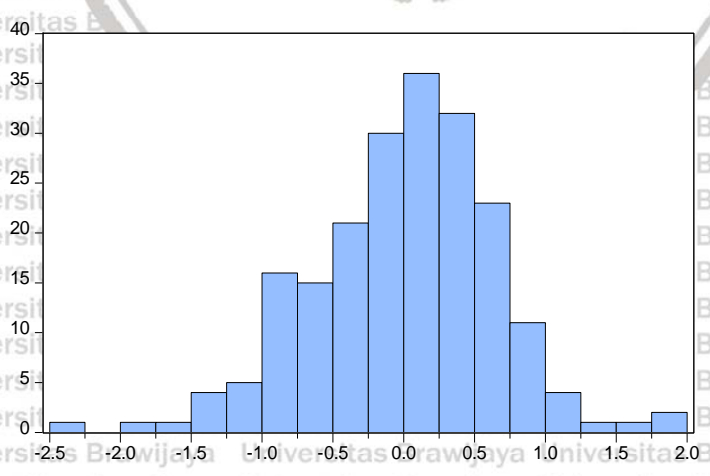
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	71.21776	1.874608	37.99075	0.0000
X1	5.02E-06	1.23E-06	4.082421	0.0001
X2	0.858935	0.206434	4.160824	0.0001
X3	-0.817205	0.077809	-10.50268	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.975782	Mean dependent var	69.48314
Adjusted R-squared	0.970561	S.D. dependent var	4.160524
S.E. of regression	0.713857	Akaike info criterion	2.326351
Sum squared resid	85.10186	Schwarz criterion	2.928167
Log likelihood	-200.2878	Hannan-Quinn criter.	2.569796
F-statistic	186.9044	Durbin-Watson stat	0.912246
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 4: Hasil Uji Normalitas



Series: Standardized Residuals	
Sample 2014 2019	
Observations 204	
Mean	4.35e-17
Median	0.076251
Maximum	1.832444
Minimum	-2.310947
Std. Dev.	0.647473
Skewness	-0.293425
Kurtosis	3.561108
Jarque-Bera	5.603490
Probability	0.060704

Lampiran 5: Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.723475	-0.251689
X2	0.723475	1.000000	-0.042090
X3	-0.251689	-0.042090	1.000000

Lampiran 6: Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/11/21 Time: 11:26
 Sample: 2014 2019
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 204

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.068734	0.343600	3.110402	0.0021
X1	-6.12E-08	1.04E-07	-0.586632	0.5581
X2	-0.069455	0.054159	-1.282436	0.2012
X3	-0.006219	0.005041	-1.233636	0.2188
R-squared	0.037456	Mean dependent var		0.507046
Adjusted R-squared	0.023018	S.D. dependent var		0.401072
S.E. of regression	0.396430	Akaike info criterion		1.006777
Sum squared resid	31.43129	Schwarz criterion		1.071838
Log likelihood	-98.69121	Hannan-Quinn criter.		1.033095
F-statistic	2.594248	Durbin-Watson stat		1.164517
Prob(F-statistic)	0.053728			

Lampiran 7: Data Penelitian

Tahun	kota	IPM	PDRB	Kemiskinan	Belanja Modal
2014	ACEH	68.81	113490.36	16.98	2407.47
2015	ACEH	69.45	112665.53	17.11	2025.1
2016	ACEH	70	116374.30	16.43	2284.85
2017	ACEH	70.60	121240.98	15.92	2168.29
2018	ACEH	71.19	126824.49	15.68	2503.94
2019	ACEH	71.90	132087.46	15.01	3162.08
2014	SUMATERA UTARA	68.87	419573.31	9.85	1145.97
2015	SUMATERA UTARA	69.51	440955.85	10.79	932.24
2016	SUMATERA UTARA	70	463775.46	10.27	1019.85
2017	SUMATERA UTARA	70.57	487531.23	9.28	1919.45
2018	SUMATERA UTARA	71.18	512765.63	8.94	1564.9
2019	SUMATERA UTARA	71.74	539526.60	8.63	1249.6
2014	SUMATERA BARAT	69.36	133340.84	6.89	785.88
2015	SUMATERA BARAT	69.98	140719.47	6.71	788.14
2016	SUMATERA BARAT	70.73	148134.24	7.14	989.92
2017	SUMATERA BARAT	71.24	155984.36	6.75	832.17
2018	SUMATERA BARAT	71.73	164033.66	6.55	1099.7
2019	SUMATERA BARAT	72.39	172320.50	6.29	1062.23
2014	RIAU	70.33	447986.78	7.99	623.64
2015	RIAU	70.84	448991.96	8.82	2014.48
2016	RIAU	71.20	458769.34	7.67	2035.63
2017	RIAU	71.79	470983.51	7.41	1941.21
2018	RIAU	72.44	482158.38	7.21	1046.85
2019	RIAU	73	495845.91	6.90	1161.03
2014	JAMBI	68.24	119991.44	8.39	818.05
2015	JAMBI	68.89	125037.40	9.12	791.48
2016	JAMBI	69.62	130501.13	8.37	945.53
2017	JAMBI	69.99	136501.71	7.90	895.64
2018	JAMBI	70.65	142968.30	7.85	784.72
2019	JAMBI	71.26	149264.62	7.51	866.5
2014	SUMATERA SELATAN	66.75	243297.77	13.62	733.38
2015	SUMATERA SELATAN	67.46	254044.88	13.77	1041.02
2016	SUMATERA SELATAN	68.24	266857.40	13.39	607.74

Tahun	kota	IPM	PDRB	Kemiskinan	Belanja Modal
2017	SUMATERA SELATAN	68.86	281571.01	13.10	1377.38
2018	SUMATERA SELATAN	69.39	298569.69	12.82	1537.27
2019	SUMATERA SELATAN	70.02	315622.62	12.56	1606.21
2014	BENGGULU	68.06	36207.15	17.09	305.05
2015	BENGGULU	68.59	38066.01	17.16	479.18
2016	BENGGULU	69.33	40076.54	17.03	385.96
2017	BENGGULU	69.95	42073.52	15.59	711.07
2018	BENGGULU	70.64	44171.16	15.41	618.47
2019	BENGGULU	71.21	46362.33	14.91	741.82
2014	LAMPUNG	66.42	189797.49	14.21	925.45
2015	LAMPUNG	66.95	199536.92	13.53	868.99
2016	LAMPUNG	67.65	209793.73	13.86	1005.77
2017	LAMPUNG	68.25	220626.10	13.04	1451.48
2018	LAMPUNG	69.02	232207.68	13.01	1729.32
2019	LAMPUNG	69.57	244436.79	12.30	1014.03
2014	BANGKA BELITUNG	68.27	44159.44	4.97	305.55
2015	BANGKA BELITUNG	69.05	45962.30	4.83	233.71
2016	BANGKA BELITUNG	69.55	47848.37	5.04	229.77
2017	BANGKA BELITUNG	69.99	49985.15	5.30	368.2
2018	BANGKA BELITUNG	70.67	52215.42	4.77	315.39
2019	BANGKA BELITUNG	71.30	53951.05	4.50	441.2
2014	KEP. RIAU	73.40	146325.23	6.40	717.99
2015	KEP. RIAU	73.75	155131.35	5.78	341.28
2016	KEP. RIAU	73.99	162853.04	5.84	303.2
2017	KEP. RIAU	74.45	166081.68	6.13	495.72
2018	KEP. RIAU	74.84	173684.30	5.83	620.05
2019	KEP. RIAU	75.48	182183.73	5.80	633.1
2014	DKI JAKARTA	78.39	1373389.13	4.09	10411.11
2015	DKI JAKARTA	78.99	1454563.85	3.61	10244.01
2016	DKI JAKARTA	79.60	1539916.88	3.75	8965.47
2017	DKI JAKARTA	80.06	1635359.15	3.78	11045.72
2018	DKI JAKARTA	80.47	1736291.05	3.55	14118.6
2019	DKI JAKARTA	80.76	1838500.71	3.42	11551.92
2014	JAWA BARAT	68.80	1149216.06	9.18	1359.8
2015	JAWA BARAT	69.50	1207232.34	9.57	2298.67
2016	JAWA BARAT	70.05	1275619.24	8.77	2859.35

Tahun	kota	IPM	PDRB	Kemiskinan	Belanja Modal
2017	JAWA BARAT	70.69	1343662.14	7.83	2311.61
2018	JAWA BARAT	71.30	1419689.12	7.25	3145.84
2019	JAWA BARAT	72.03	1491705.81	6.82	2530.34
2014	JAWA TENGAH	68.78	764959.15	13.58	1570.67
2015	JAWA TENGAH	69.49	806765.09	13.32	2514.68
2016	JAWA TENGAH	69.98	849099.35	13.19	2815.67
2017	JAWA TENGAH	70.52	893750.30	12.23	1454.59
2018	JAWA TENGAH	71.12	941164.12	11.19	1681.75
2019	JAWA TENGAH	71.73	992105.79	10.58	2099.71
2014	DI YOGYAKARTA	76.81	79536.08	14.55	442.44
2015	DI YOGYAKARTA	77.59	83474.45	13.16	627.6
2016	DI YOGYAKARTA	78.38	87685.81	13.10	836.87
2017	DI YOGYAKARTA	78.89	92300.24	12.36	1046.73
2018	DI YOGYAKARTA	79.53	98024.26	11.81	1132.82
2019	DI YOGYAKARTA	79.99	104489.71	11.44	1035.2
2014	JAWA TIMUR	68.14	1262684.50	12.28	1207.45
2015	JAWA TIMUR	68.95	1331376.10	12.28	2258.32
2016	JAWA TIMUR	69.74	1405563.51	11.85	2150.59
2017	JAWA TIMUR	70.27	1482299.58	11.20	3090.05
2018	JAWA TIMUR	70.77	1563769.10	10.85	2840.55
2019	JAWA TIMUR	71.50	1650143.15	10.20	2770.97
2014	BANTEN	69.89	349351.23	5.51	691.48
2015	BANTEN	70.27	368377.20	5.75	1435.96
2016	BANTEN	70.96	387835.09	5.36	1334.13
2017	BANTEN	71.42	410137.00	5.59	1349.68
2018	BANTEN	71.95	434014.59	5.25	1362.55
2019	BANTEN	72.44	458022.71	4.94	1379.31
2014	BALI	72.48	121787.57	4.76	370.58
2015	BALI	73.27	129126.56	5.25	562.23
2016	BALI	73.65	137296.45	4.15	730.92
2017	BALI	74.30	144933.31	4.14	660.43
2018	BALI	74.77	154109.80	3.91	440.71
2019	BALI	75.38	162783.94	3.61	556.75
2014	NUSA TENGGARA BARAT	64.31	73372.96	17.05	422.79
2015	NUSA TENGGARA BARAT	65.19	89337.99	16.54	834.58
2016	NUSA TENGGARA BARAT	65.81	94524.29	16.02	696.68

Tahun	kota	IPM	PDRB	Kemiskinan	Belanja Modal
2017	NUSA TENGGARA BARAT	66.58	94608.21	15.05	1153.48
2018	NUSA TENGGARA BARAT	67.30	90391.46	14.63	891.88
2019	NUSA TENGGARA BARAT	68.14	94014.74	13.88	669.7
2014	NUSA TENGGARA TIMUR	62.26	54107.97	19.60	407.6
2015	NUSA TENGGARA TIMUR	62.67	56770.79	22.58	606.7
2016	NUSA TENGGARA TIMUR	63.13	59678.01	22.01	602.29
2017	NUSA TENGGARA TIMUR	63.73	62725.41	21.38	482.92
2018	NUSA TENGGARA TIMUR	64.39	65944.91	21.03	529.76
2019	NUSA TENGGARA TIMUR	65.23	69372.47	20.62	798.22
2014	KALIMANTAN BARAT	64.89	107114.96	8.07	490.21
2015	KALIMANTAN BARAT	65.59	112346.76	8.44	368.54
2016	KALIMANTAN BARAT	65.88	118183.27	8	474.8
2017	KALIMANTAN BARAT	66.26	124289.17	7.86	954.91
2018	KALIMANTAN BARAT	66.98	130589.02	7.37	676.48
2019	KALIMANTAN BARAT	67.65	137121.18	7.28	871.6
2014	KALIMANTAN TENGAH	67.77	73724.52	6.07	814.5
2015	KALIMANTAN TENGAH	68.53	78890.97	5.91	959.14
2016	KALIMANTAN TENGAH	69.13	83900.24	5.36	783.86
2017	KALIMANTAN TENGAH	69.79	89544.90	5.26	565.24
2018	KALIMANTAN TENGAH	70.42	94600.90	5.10	1060.39
2019	KALIMANTAN TENGAH	70.91	100428.67	4.81	1293.57
2014	KALIMANTAN SELATAN	67.63	106779.40	4.81	1266.88
2015	KALIMANTAN SELATAN	68.38	110863.12	4.72	1221.73

Tahun	kota	IPM	PDRB	Kemiskinan	Belanja Modal
2016	KALIMANTAN SELATAN	69.05	115743.57	4.52	1348.72
2017	KALIMANTAN SELATAN	69.65	121858.52	4.70	1388
2018	KALIMANTAN SELATAN	70.17	128092.67	4.65	1117.19
2019	KALIMANTAN SELATAN	70.72	133317.87	4.47	1495.67
2014	KALIMANTAN TIMUR	73.82	446029.05	6.31	2211.31
2015	KALIMANTAN TIMUR	74.17	440676.36	6.10	2007.13
2016	KALIMANTAN TIMUR	74.59	439003.83	6	1571.81
2017	KALIMANTAN TIMUR	75.12	452741.91	6.08	938.33
2018	KALIMANTAN TIMUR	75.83	464823.49	6.06	1829.25
2019	KALIMANTAN TIMUR	76.61	486977.18	5.91	1207.81
2014	KALIMANTAN UTARA	68.64	47696.35	9.78	224.63
2015	KALIMANTAN UTARA	68.76	49315.75	6.32	668.6
2016	KALIMANTAN UTARA	69.20	51064.74	6.99	797.28
2017	KALIMANTAN UTARA	69.84	54537.31	6.96	655.21
2018	KALIMANTAN UTARA	70.56	57837.24	6.86	637.66
2019	KALIMANTAN UTARA	71.15	61834.58	6.49	567.37
2014	SULAWESI UTARA	69.96	66360.76	8.26	506.72
2015	SULAWESI UTARA	70.39	70425.33	8.98	757.27
2016	SULAWESI UTARA	71.05	74764.66	8.20	745.89
2017	SULAWESI UTARA	71.66	79484.03	7.90	757.82
2018	SULAWESI UTARA	72.20	84258.55	7.59	721.4
2019	SULAWESI UTARA	72.99	89028.05	7.51	898.36
2014	SULAWESI TENGAH	66.43	71677.53	13.61	276.83
2015	SULAWESI TENGAH	66.76	82787.20	14.07	442.52
2016	SULAWESI TENGAH	67.47	91014.56	14.09	503.97
2017	SULAWESI TENGAH	68.11	97474.86	14.22	465.12
2018	SULAWESI TENGAH	68.88	103593.34	13.69	459.78
2019	SULAWESI TENGAH	69.50	111003.07	13.18	836.61
2014	SULAWESI SELATAN	68.49	233988.05	9.54	676.23
2015	SULAWESI SELATAN	69.15	250802.99	10.12	849.3

Tahun	kota	IPM	PDRB	Kemiskinan	Belanja Modal
2016	SULAWESI SELATAN	69.76	269401.31	9.24	856.86
2017	SULAWESI SELATAN	70.34	288814.17	9.48	1051.18
2018	SULAWESI SELATAN	70.90	309202.40	8.87	1081.8
2019	SULAWESI SELATAN	71.66	330605.13	8.56	969.49
2014	SULAWESI TENGGARA	68.07	68291.78	12.77	553.49
2015	SULAWESI TENGGARA	68.75	72993.33	13.74	683.5
2016	SULAWESI TENGGARA	69.31	77745.51	12.77	751.91
2017	SULAWESI TENGGARA	69.86	83001.69	11.97	903.12
2018	SULAWESI TENGGARA	70.61	88328.71	11.32	795.19
2019	SULAWESI TENGGARA	71.20	94078.15	11.04	1194.73
2014	GORONTALO	65.17	20775.80	17.41	232.42
2015	GORONTALO	65.86	22068.80	18.16	344.24
2016	GORONTALO	66.29	23507.21	17.63	296.92
2017	GORONTALO	67.01	25090.13	17.14	254.84
2018	GORONTALO	67.71	26721.27	15.83	280.49
2019	GORONTALO	68.49	28432.87	15.31	280.12
2014	SULAWESI BARAT	62.24	24195.65	12.05	267.01
2015	SULAWESI BARAT	62.96	25964.43	11.90	445.22
2016	SULAWESI BARAT	63.60	27524.77	11.19	498.73
2017	SULAWESI BARAT	64.30	29282.49	11.18	459.83
2018	SULAWESI BARAT	65.10	31111.35	11.22	321.97
2019	SULAWESI BARAT	65.73	32873.53	10.95	364.24
2014	MALUKU	66.74	23567.73	18.44	369.32
2015	MALUKU	67.05	24859.20	19.36	542.78
2016	MALUKU	67.60	26284.23	19.26	753.75
2017	MALUKU	68.19	27814.05	18.29	545.78
2018	MALUKU	68.87	29466.80	17.85	601.51
2019	MALUKU	69.45	31108.76	17.65	543.81
2014	MALUKU UTARA	65.18	19208.76	7.41	427.96
2015	MALUKU UTARA	65.91	20380.30	6.22	423.49
2016	MALUKU UTARA	66.63	21556.68	6.41	592.69

Tahun	kota	IPM	PDRB	Kemiskinan	Belanja Modal
2017	MALUKU UTARA	67.20	23210.86	6.44	561.61
2018	MALUKU UTARA	67.76	25050.12	6.62	513.35
2019	MALUKU UTARA	68.70	26586.03	6.91	671.26
2014	PAPUA BARAT	61.28	50259.91	26.26	1191.78
2015	PAPUA BARAT	61.73	52346.49	25.73	1677
2016	PAPUA BARAT	62.21	54711.28	24.88	1446.54
2017	PAPUA BARAT	62.99	56907.96	23.12	770.1
2018	PAPUA BARAT	63.74	60464.28	22.66	1539.27
2019	PAPUA BARAT	64.70	62070.80	21.51	1757.98
2014	PAPUA	56.75	121391.23	27.80	1689.3
2015	PAPUA	57.25	130311.60	28.40	2865.46
2016	PAPUA	58.05	142224.93	28.40	2490.33
2017	PAPUA	59.09	148818.29	27.76	2328.01
2018	PAPUA	60.06	159790.31	27.43	1918.5
2019	PAPUA	60.84	134677.64	26.55	2236.55

